



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN PINRANG TAHUN 2014



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**

<http://pinrangkab.bps.go.id>



Kata Pengantar

Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) Kabupaten Pinrang tahun 2013 memuat berbagai indikator antara lain: indikator Kependudukan, Keluarga Berencana, Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, Perumahan dan indikator-indikator lainnya. Secara umum indikator tersebut diharapkan dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat Kabupaten Pinrang. Publikasi ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan data yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat di wilayah Kabupaten Pinrang. Selain itu, diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pembangunan daerah, khususnya di bidang sosial.

Publikasi ini masih jauh dari sempurna. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna penyempurnaan publikasi berikutnya.

Pinrang, Oktober 2014

BPS KABUPATEN PINRANG
K e p a l a,

Ir.H.Yunus
NIP. 19650317 199301 1001

<http://pinrangkab.bps.go.id>



Daftar Isi

BAB I Pendahuluan	1
BAB II Kependudukan.....	6
BAB III Keluarga Berencana.....	14
BAB IV Pendidikan	25
BAB V Kesehatan	34
BAB VI Ketenagakerjaan	45
BAB VII Fasilitas Perumahan.....	59
BAB VIII Konsumsi Rumah Tangga dan Kemiskinan.....	73

<http://pinrangkab.bps.go.id>



Bab I

Pendahuluan

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan mempunyai makna yang luas, tidak hanya terkait dengan terpenuhinya kebutuhan seperti sandang, pangan dan papan tetapi juga menyangkut pemenuhan aspek kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup bahkan rasa aman. Oleh karena itu, indikator pertumbuhan ekonomi atau pendapatan per kapita saja tidak cukup untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Diperlukan indikator-indikator lain seperti banyaknya penduduk yang bersekolah, tingkat kesehatan masyarakat, dan tingkat kemiskinan untuk mendapatkan gambaran kesejahteraan secara utuh.

Ketersediaan data-data terkait sosial dan ekonomi sangat penting untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan pembangunan telah dicapai pemerintah suatu daerah. Badan Pusat Statistik (BPS) diberi amanat oleh undang-undang untuk melaksanakan kegiatan statistik dasar. Statistik dasar adalah menyediakan data-data sosial maupun ekonomi melalui berbagai survei dan sensus.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat menyajikan berbagai indikator dasar yang terkait dengan kependudukan, keluarga berencana (KB), pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan dan pengeluaran konsumsi yang disertai penjelasan ringkas. Data-data yang ditampilkan merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2013.

Konsep Dan Definisi

Untuk menghindari kesalahpahaman atas konsep yang digunakan, BPS telah menentukan konsep dan definisi untuk setiap variabel yang akan dikumpulkan. Definisi tersebut baku dan berlaku secara umum untuk setiap publikasi yang dikeluarkan BPS.

Konsep	Definisi
Rumah Tangga Biasa	adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah mengurus kebutuhan sehari-hari bersama menjadi satu
Kepadatan Penduduk	adalah rata-rata banyaknya penduduk per km ²
Rasio Jenis Kelamin	adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dengan wanita dikali 100
Kawin	adalah mempunyai istri/suami pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum, tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri
Cerai Hidup	adalah berpisah sebagai suami/istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ke tempat lain karena mencari pekerjaan
Cerai Mati	adalah ditinggal mati oleh suami/istrinya dan belum kawin lagi
Metode Kontrasepsi	adalah alat/cara pencegah kehamilan
Sekolah	adalah kegiatan bersekolah di sekolah formal mulai dari

	pendidikan sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi, termasuk pendidikan yang disamakan
Tidak atau Belum Pernah Sekolah	adalah tidak atau belum pernah sekolah di sekolah formal, misalnya tamat/belum tamat Taman Kanak-Kanak tetapi tidak melanjutkan ke SD
Masih Bersekolah	adalah sedang mengikuti pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi
Tidak Sekolah Lagi	adalah pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah, atau perguruan tinggi tetapi pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi
Melek Huruf	adalah penduduk 10 tahun keatas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya
Angka Partisipasi Sekolah	adalah partisipasi penduduk usia tertentu yang masih sekolah atau jenjang pendidikan tertentu terhadap seluruh penduduk pada umur tersebut
Keluhan Kesehatan	adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan, kejiwaan, atau hal lain. Seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada waktu survei yang bersangkutan tidak kambuh penyakitnya
Penduduk Usia Kerja	Adalah penduduk yang berusia 10 tahun keatas
Angkatan Kerja	Adalah penduduk usia 10 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan
Angkatan Kerja	Adalah penduduk usia 10 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, baik yang bekerja maupun sementara tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti menunggu panen, sedang cuti dan sedang menunggu pekerjaan berikutnya. Disamping itu mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari

	pekerjaan
Bukan Angkatan Kerja	Adalah mereka yang berusia 10 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu hanya bersekolah, mengurus rumahtangga, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang tidak dapat dimasukkan dalam kategori bekerja atau mencari pekerjaan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Perbandingan antara penduduk usia 10 tahun keatas (usia kerja) dengan angkatan kerja
Penganggur	Adalah mereka yang termasuk angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan
Bekerja	Kegiatan melakukan pekerjaan paling sedikit satu jam berturut-turut selama seminggu dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan. Pekerja keluarga yang tidak dibayar termasuk kelompok penduduk yang bekerja
Angka Beban Tanggungan	Angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia non produktif (usia dibawah 15 tahun dan usia 65 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif (antara usia 15 tahun sampai usia 64 tahun) dikali 100

<http://pinrangkab.bps.go.id>



Bab II

Kependudukan

Penduduk merupakan modal dasar pembangunan, namun di sisi lain penduduk juga merupakan beban untuk mencapai pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, masalah kependudukan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah baik yang berorientasi langsung terhadap faktor demografi seperti kelahiran, kematian dan mutasi penduduk maupun terhadap kehidupan sosial misalnya tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan kemiskinan.

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah baik sosial maupun ekonomi. Jumlah penduduk yang semakin meningkat menuntut pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan maupun penyediaan lapangan pekerjaan.

Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan produksi pangan akan mempengaruhi kualitas hidup manusia. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali juga berpotensi menghambat pencapaian kesejahteraan masyarakat. Jumlah penduduk di suatu wilayah mempengaruhi taraf kehidupan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Jika suatu wilayah memiliki jumlah penduduk yang besar sementara pendapatan regional di wilayah tersebut relatif kecil akan mengakibatkan pendapatan per kapita wilayah tersebut rendah.

Permasalahan pemenuhan kebutuhan pokok sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali serta kesejahteraan masyarakat yang rendah akan mendorong munculnya permasalahan-permasalahan sosial. Ketimpangan ekonomi, kurangnya lapangan pekerjaan dan kemiskinan merupakan beberapa faktor yang dapat memicu tindak kriminalitas.

Permasalahan kependudukan mencakup aspek yang sangat luas, baik sosial maupun ekonomi. Penanganan permasalahan juga membutuhkan koordinasi lintas sektoral agar dapat dicapai penyelesaian yang komprehensif. Mengingat pentingnya aspek penduduk dalam pembangunan, maka diperlukan dukungan data-data kependudukan dalam perencanaan maupun evaluasi pembangunan.

Dalam bab ini akan dibahas berbagai indikator dasar kependudukan yang meliputi jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, persebaran dan komposisi penduduk, serta angka beban ketergantungan.

2.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk pada tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Pinrang tercatat sebesar 361.293 jiwa, dengan rasio jenis kelamin 94,04 yang berarti dari setiap 100 penduduk wanita terdapat sekitar 94 penduduk laki-laki. Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sulawesi Selatan, jumlah penduduk di Kabupaten Pinrang menempati urutan keenam terbesar setelah Kota Makassar, Kabupaten Bone, Gowa, Bulukumba dan Wajo.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2013 sebesar 0,83%. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Pinrang terus menurun sepanjang periode 2011-2013. Pada tahun 2011 laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,88% dan pada tahun 2012 sebesar 0,84%. Meskipun demikian program-program pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program-program Keluarga Berencana (KB) perlu dilanjutkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan penduduk tetap terkendali.

Angka rasio jenis kelamin dari tahun 2011 terus meningkat menunjukkan proporsi penduduk laki-laki terhadap perempuan yang semakin meningkat. Hal ini juga menunjukkan, secara implisit, bahwa laju pertumbuhan penduduk laki-laki lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk laki-laki Kabupaten Pinrang pada tahun 2013 sebesar 0,86% sementara untuk perempuan hanya 0,81%.

Tabel 1. Jumlah, Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2011-2013

Tahun	Jumlah Penduduk (Juta)	Laju Pertumbuhan per Tahun (%)	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	355.3	0.88	93.94
2012	358.3	0.84	93.99
2013	361.3	0.83	94.04

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2035

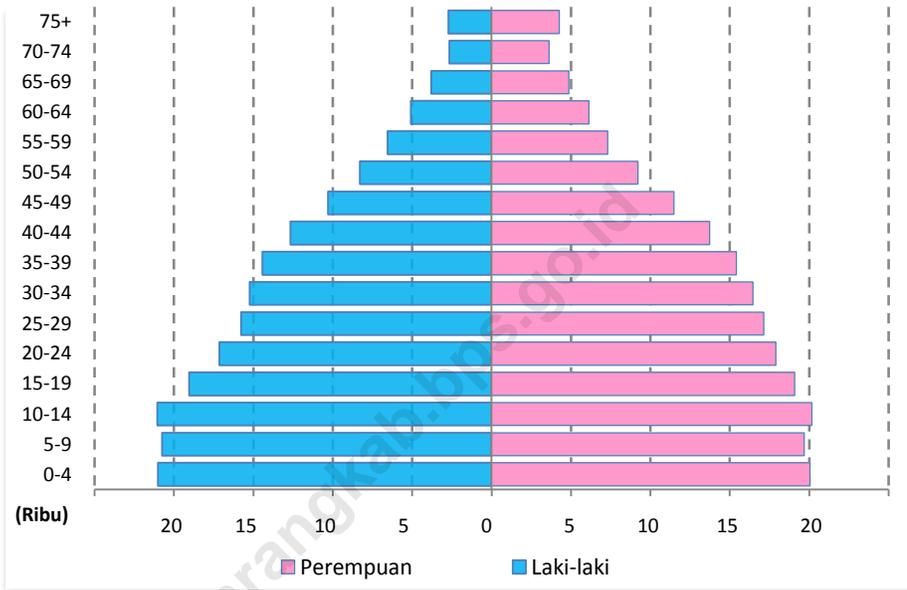
2.2. Persebaran dan Komposisi Penduduk

Persebaran penduduk yang tidak merata merupakan permasalahan di hampir seluruh wilayah Indonesia. Persebaran penduduk yang tidak merata dipengaruhi berbagai hal antara lain kondisi geografis, tingkat kesuburan tanah, pusat kegiatan ekonomi, dan faktor sosial budaya. Persebaran penduduk di Kabupaten Pinrang masih terpusat di ibukota kabupaten dan sekitarnya yaitu di Kecamatan Watang Sawitto, Paleteang dan Tiroang. Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Lembang. Meskipun merupakan kecamatan yang terluas dan memiliki potensi perkebunan namun secara geografis Kecamatan Lembang merupakan daerah pegunungan dengan infrastruktur yang belum memadai.

Kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Pinrang pada tahun 2013 adalah 184 jiwa per km². Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Paleteang dengan kepadatan penduduk 1.050 jiwa per km² dan yang terendah adalah Kecamatan Lembang dengan kepadatan penduduk 53 jiwa per km².

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat menggambarkan fertilitas (kelahiran), migrasi (perpindahan penduduk), serta mortalitas (kematian). Piramida penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2013 menunjukkan adanya dominasi penduduk muda baik laki-laki maupun perempuan. Bentuk piramida penduduk yang menyerupai segitiga menunjukkan tingkat fertilitas serta mortalitas yang relatif tinggi. Garis piramida yang memendek pada kelompok umur 15-29 tahun

mengindikasikan adanya migrasi penduduk keluar Kabupaten Pinrang untuk berbagai alasan, misalnya melanjutkan pendidikan ataupun bekerja.



Gambar 1. Piramida Penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2013

Tabel 2 menunjukkan persentase terbesar penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2013 adalah kelompok usia produktif (usia 15-64 tahun) yaitu sebesar 62,82 persen. Sementara itu, persentase penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 30,81persen dan penduduk usia tua (65 tahun keatas) sebesar 6,37persen.

2.3. Angka Beban Ketergantungan (ABT)

Angka Beban Ketergantungan (ABT) merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif dengan jumlah penduduk usia produktif. Penduduk usia produktif disebut juga angkatan kerja yang dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebaliknya penduduk usia non produktif adalah bukan angkatan kerja yang tidak dapat memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, ABT dapat menjadi indikator kasar kondisi ekonomi suatu wilayah.

Tabel 2. Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2012-2013

Kelompok Umur	2012			2013		
	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0-14	34,46	30,80	32,57	32,41	29,30	30,81
15-64	60,52	61,75	61,16	62,11	63,49	62,82
65+	5,02	7,45	6,27	5,48	7,21	6,37
ABT	65,23	61,94	63,50	61,00	57,50	59,18

Sumber : Proyeksi Penduduk 2010-2035 (diolah)

Semakin tinggi ABT menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi, demikian sebaliknya.

Kondisi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2013 menunjukkan ABT muda sebesar 49,04 persen yang berarti pada 100 orang penduduk usia produktif mempunyai tanggungan sekitar 49 orang penduduk yang belum produktif. ABT tua sebesar 10,14 persen artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif memiliki tanggungan sekitar 10 orang penduduk yang tidak produktif lagi. Secara rata-rata ABT Kabupaten Pinrang tahun 2013 sebesar 59,18 persen yang menunjukkan bahwa dalam setiap 100 orang penduduk usia produktif terdapat sekitar 59 orang penduduk non produktif.

ABT Kabupaten Pinrang pada tahun 2013 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor yaitu peningkatan proporsi penduduk usia produktif dan penurunan proporsi penduduk usia non produktif. Penurunan ABT tentu menjadi sinyal yang baik bagi karena menunjukkan penurunan beban ekonomi. Peningkatan proporsi penduduk usia produktif dari 61,16 persen pada tahun 2012 menjadi 62,82 persen pada tahun 2013 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk yang potensial sebagai modal dasar pembangunan di Kabupaten Pinrang. Di sisi lain, keberhasilan pengendalian angka kelahiran juga akan mendorong menurunnya ABT dengan mengurangi proporsi penduduk muda yang belum produktif.

<http://pinrangkab.bps.go.id>



Bab III

Keluarga Berencana

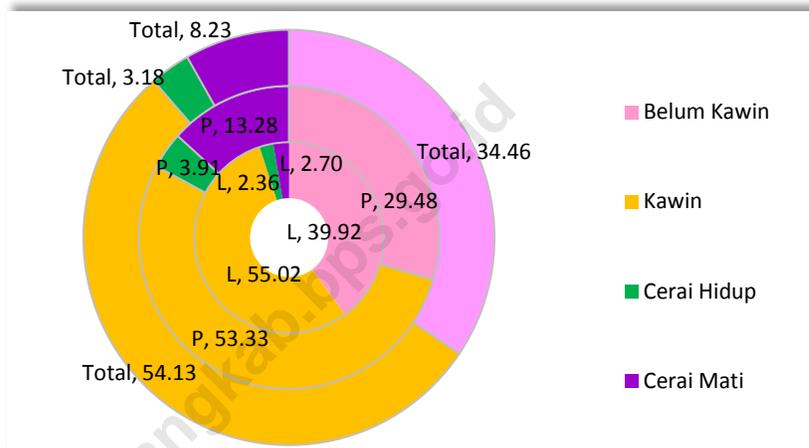
Undang-Undang NO. 52 Tahun 2009 menekankan bahwa Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah mengamanatkan perlunya pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas dan pengarahannya mobilitas penduduk agar mampu menjadi sumberdaya yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional.

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk Indonesia adalah dengan menerapkan program Keluarga Berencana (KB). Program KB merupakan gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran bayi melalui penggunaan alat-alat kontrasepsi seperti kondom, spiral, IUD, dan sebagainya. Selain itu, melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 ayat 1, pemerintah menetapkan umur minimum perkawinan pada wanita 16 tahun, sedangkan laki-laki 19 tahun.

3.1. Status Perkawinan

Konsep perkawinan yang digunakan dalam pengumpulan data demografi BPS lebih difokuskan pada kondisi dimana pria dan wanita hidup bersama untuk waktu yang lama baik yang dikukuhkan dalam perkawinan yang sah menurut Undang-undang (de Jure) maupun tanpa pengesahan

perkawinan (de Facto). Hal ini dilakukan terutama untuk memperoleh pendekatan yang lebih tepat mengenai keterkaitan antara status perkawinan dengan dinamika penduduk terutama banyaknya kelahiran yang diakibatkan oleh lamanya ikatan perkawinan.



Gambar 2. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Status Perkawinan, 2013

Menurut status perkawinannya, penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2013 yang berstatus kawin sebanyak 54,13 persen; belum kawin 34,46 persen; cerai mati 8,23 persen; dan cerai hidup 3,18 persen. Persentase penduduk Kabupaten Pinrang yang berstatus kawin untuk laki-laki adalah 55,02 persen, lebih besar dibandingkan persentase perempuan yaitu 53,33 persen. Demikian pula untuk penduduk yang belum kawin, persentase penduduk laki-laki belum kawin (39,92 persen) lebih besar dibanding perempuan belum kawin (29,48 persen). Sementara untuk penduduk yang berstatus cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati, persentase penduduk perempuan yang berstatus cerai lebih besar dibanding laki-laki. Persentase penduduk yang berstatus cerai hidup pada

tahun 2013 untuk perempuan sebesar 3,91persen dan laki-laki sebesar 2,36 persen.

Persentase penduduk laki-laki berstatus cerai mati dan cerai hidup lebih besar dibanding perempuan. Demikian pula persentase laki-laki berstatus kawin juga lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini menunjukkan fenomena bahwa laki-laki yang telah cerai hidup ataupun cerai mati, tidak berselang lama kemudian menikah kembali sedangkan perempuan lebih banyak yang mempertahankan status jandanya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati. Fenomena lain yang tampak dari data diatas adalah perempuan lebih cepat menikah dari pada laki-laki yang ditunjukkan oleh persentase perempuan berstatus belum kawin lebih kecil dibandingkan laki-laki.

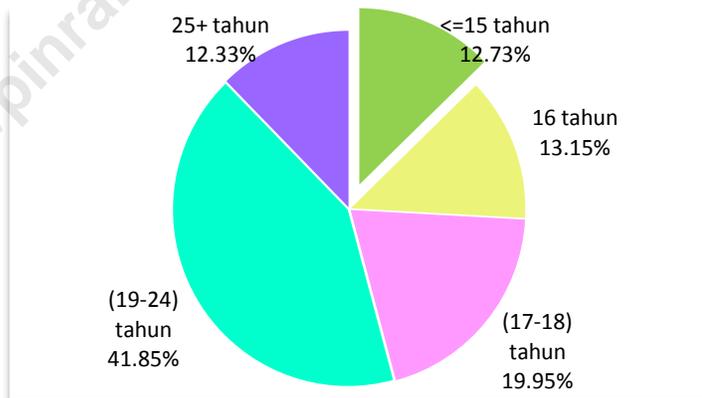
3.2. Umur Perkawinan Pertama

Indikator umur perkawinan pertama bagi perempuan penting bagi penentuan kebijakan yang terkait kependudukan terutama untuk program-program peningkatan kualitas keluarga dan perencanaan keluarga. Angka fertilitas yang mempengaruhi. Perkawinan usia dini akan berdampak pada kualitas keluarga serta resiko kesehatan dalam kehamilan dan persalinan. Diketuainya berapa besar pasangan usia subur (persentase perempuan usia subur yang menikah) juga akan memudahkan perencanaan program KB untuk mempersiapkan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi.

Laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh tingkat fertilitas yang erat kaitannya dengan umur perkawinan pertama. Umur perkawinan

pertama sebagai umur pertama kali menikah menandakan dimulainya masa reproduksi. Terdapat hubungan negatif antara umur perkawinan pertama dengan tingkat fertilitas. Semakin muda umur perkawinan pertama seorang wanita, maka semakin tinggi pula fertilitas wanita tersebut.

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 usia minimal perempuan untuk menikah adalah 16 tahun, sedangkan menurut Undang-undang Perlindungan Anak usia minimal perempuan untuk menikah adalah 18 tahun. Sementara itu, menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) umur ideal bagi perempuan untuk menikah adalah 21-25 tahun. Perkawinan di pada rentang usia ini, lebih baik dari sisi kesehatan reproduksi maupun mental. Karena pada usia tersebut, organ-organ reproduksi wanita dianggap lebih siap untuk menghadapi resiko persalinan, serta lebih siap mental untuk merawat dan membesarkan anaknya tersebut.



Gambar 3. Persentase Wanita Berumur 10 Tahun ke atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama, 2013

Sebagian besar perempuan di Kabupaten Pinrang menikah pertama kali pada umur yang cukup ideal yaitu pada umur 19 hingga 24 tahun, sebanyak

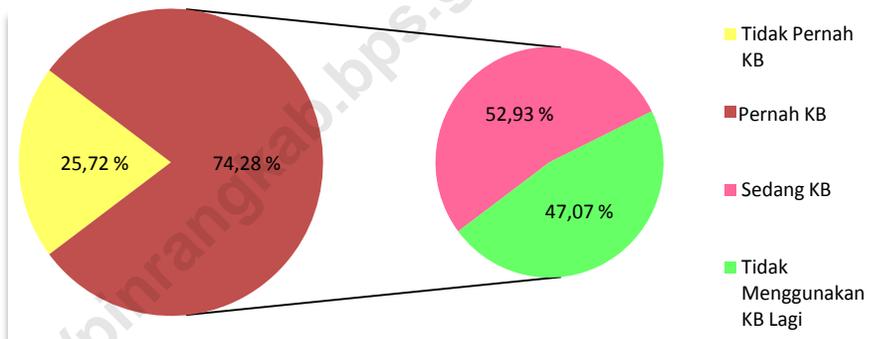
41,85 persen. Persentase perempuan di Kabupaten Pinrang yang menikah pada umur 17-18 tahun adalah 19,95 persen wanita. Sementara wanita yang menikah pada umur 25 tahun keatas memiliki persentase terkecil yakni 12,33 persen.

Fenomena perkawinan di bawah umur minimum perkawinan yang telah ditetapkan, yaitu 16 tahun ternyata masih terjadi di Kabupaten Pinrang. Sebesar 13,15 persen perempuan menikah pertama kali pada umur 16 tahun, bahkan masih terdapat 12,73 persen perempuan yang menikah pada usia kurang dari 15 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa aturan yang digalakkan pemerintah masih belum dilaksanakan sepenuhnya baik oleh masyarakat, maupun oleh instansi penyelenggara perkawinan. Sehingga diperlukan penyuluhan yang lebih intensif serta kesadaran masyarakat itu akan pentingnya ditetapkan batasan umur tersebut.

3.3. Pemakaian Alat/Cara KB

Pengendalian laju pertumbuhan penduduk dilakukan dengan cara menekan angka fertilitas, di Indonesia dilakukan melalui program Keluarga Berencana (KB). Program KB memberikan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi serta pentingnya pengaturan jarak kehamilan dan jumlah kelahiran dengan menggunakan alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi dapat digunakan oleh laki-laki maupun wanita. Namun penggunaan alat kontrasepsi di Indonesia mayoritas adalah wanita.

Angka prevalensi pemakaian kontrasepsi adalah angka yang menunjukkan berapa banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan dibandingkan dengan seluruh PUS di suatu wilayah. Informasi tentang besarnya prevalensi KB sangat bermanfaat untuk menetapkan kebijakan pengendalian kependudukan serta penyediaan pelayanan KB baik dalam bentuk mempersiapkan pelayanan kontrasepsi, serta pelayanan konseling untuk menampung kebutuhan dan menanggapi keluhan pemakaian kontrasepsi.



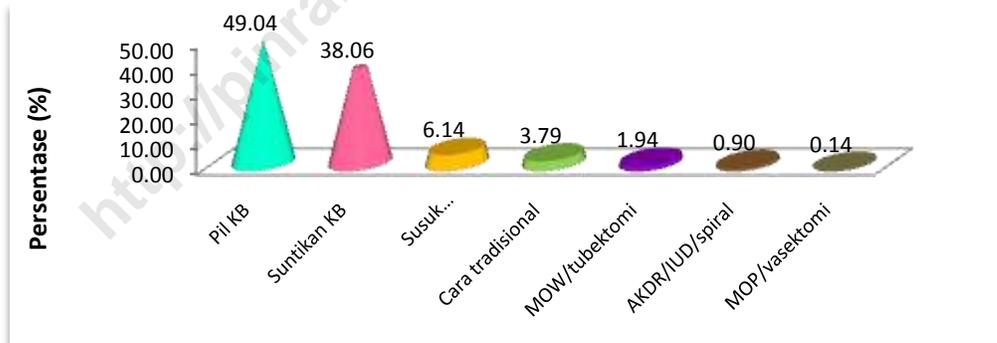
Gambar 4. Prevalensi Pemakaian Alat/Cara KB Wanita Berstatus Kawin Umur 15-49 Tahun 2013

Mayoritas wanita pernah kawin (WPK) di Kabupaten Pinrang pernah menggunakan alat kontrasepsi (74,28 persen), sementara sisanya yaitu 25,72 persen tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas PUS di Kabupaten Pinrang menyadari akan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan maupun membatasi jumlah kelahiran. Dari 74,28 persen WPK yang pernah

menggunakan KB; 52,93 persen masih menggunakan alat kontrasepsi hingga saat ini dan 47,07 persen sisanya tidak menggunakan lagi.

Prevalensi Pemakaian Alat Kontrasepsi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2013 adalah 40 persen. Hal ini berarti sekitar 4 dari 10 PUS menggunakan alat kontrasepsi. Alasan WPK yang sedang tidak ber-KB diantaranya karena telah menginjak masa menopause sehingga tidak akan mungkin hamil lagi atau karena pasangannya tidak tinggal di Kabupaten Pinrang (Susenas, 2013).

Gambar 5 menampilkan jenis alat kontrasepsi yang digunakan oleh WPK yang sedang KB. Jenis alat kontrasepsi yang paling diminati di Kabupaten Pinrang adalah pil KB yaitu digunakan oleh 40,04 persen WPK. Pil KB dinilai alat kontrasepsi yang aman dan mudah digunakan, harganya terjangkau, serta efektif mencegah kehamilan



Gambar 5. Prevalensi Pemakaian Alat/Cara KB Wanita Berstatus Kawin Umur 15-49 Tahun 2013

Alat kontrasepsi kedua yang digemari adalah suntik KB. Suntik KB juga termasuk mudah penggunaannya, karena disuntikkan hanya setiap 3

bulan, 10 minggu atau setiap bulan. Suntik KB digunakan oleh 38,06 persen WPK dan sebanyak 6,14 persen WPK menggunakan susuk. Kedua jenis alat kontrasepsi tersebut termasuk kontrasepsi sementara sedangkan kontrasepsi permanen misalnya MOW/tubektomi, AKDR/IUD/spiral, dan MOP/Vasektomi paling sedikit digunakan. Pengguna ketiga alat kontrasepsi tersebut berturut-turut adalah 1,94 persen, 0,90 persen dan 0,14 persen.

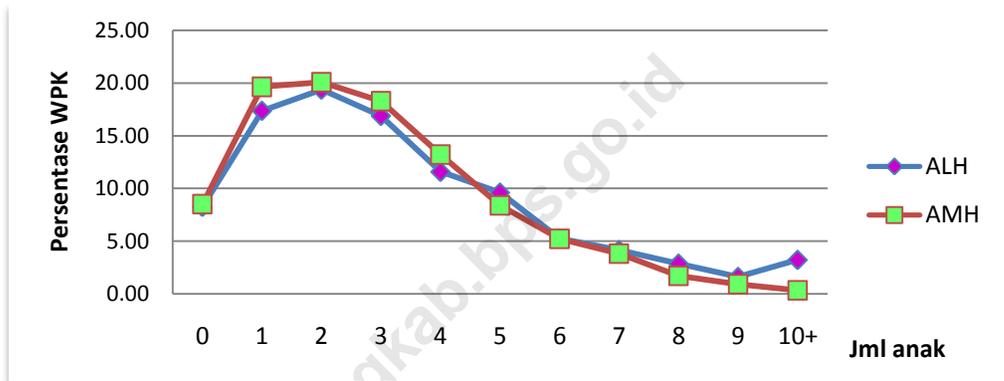
MOP adalah Metoda Operasi Pria atau Vasektomi yang dilakukan dengan cara operasi pemotongan atau memutuskan saluran sperma pada pria, sehingga pasangannya tidak akan mengalami kehamilan. PUS yang telah menggunakan MOP/Vasektomi dan MOW/Tubektomi akan secara permanen tidak memiliki keturunan lagi. Biasanya, jenis kontrasepsi ini dipilih oleh PUS yang telah merasa cukup dengan jumlah anak yang dimilikinya serta tidak berniat menambah anak lagi. Atau terpaksa dilakukan oleh PUS dengan penyakit tertentu pada organ reproduksinya.

Kontrasepsi tradisional masih digunakan oleh 3,79 persen WPK di Kabupaten Pinrang. Cara tradisional tradisional umumnya dipilih oleh pasangan yang mengkhawatirkan efek samping dari alat kontrasepsi, namun cara ini memiliki tingkat kegagalan yang cukup tinggi.

3.3. Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH)

Gambar 6 menunjukkan persentase WPK menurut jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) yang ditunjukkan oleh titik berwarna hijau dan Anak Masih Hidup (AMH) yang ditunjukkan oleh titik berwarna ungu. Secara umum terlihat bahwa kurva ALH dan AMH naik pada saat jumlah anak 1, 2, dan 3,

tetapi setelah itu berangsur-angsur menurun tajam hingga pada jumlah anak diatas 10. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar WPK memiliki 1-3 orang anak saja. Sementara itu, WPK yang memiliki anak 4-10 atau lebih persentasenya cenderung kecil.



Gambar 6. Persentase Wanita Pernah Kawin (WPK) Menurut Jumlah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH), Tahun 2013

Semakin besar jarak ALH dan AMH menunjukkan semakin besar pula tingkat mortalitas di suatu wilayah pada waktu tertentu. Sebagai contoh, persentase WPK yang memiliki ALH nol adalah 8,25 persen. Sedangkan untuk jumlah anak nol, persentase WPK untuk AMH-nya sebesar 8,50 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 0,25 persen WPK dengan ALH sama dengan satu yang anaknya meninggal dunia.

Persentase WPK yang memiliki 2 anak adalah paling besar, baik pada ALH (19,36 persen) maupun AMH (20,08 persen). Hal ini bisa terjadi karena dua hal, yaitu keberhasilan program KB yang dilakukan berkat kerjasama

masyarakat dan pemerintah, atau bisa juga karena terjadinya kematian ALH pada WPK dengan jumlah anak lebih dari dua.

Tabel 3. Persentase wanita berumur 10 tahun ke atas yang pernah kawin menurut jumlah anak yang dilahirkan (ALH) dan jumlah anak yang masih hidup (AMH), 2013

Jumlah Anak	ALH (persen)	AMH (persen)
(1)	(2)	(3)
0	8,25	8,50
1	17,35	19,64
2	19,36	20,08
3	16,87	18,29
4	11,57	13,21
5	9,59	8,37
6	5,22	5,20
7	4,13	3,79
8	2,86	1,69
9	1,59	0,90
10+	3,21	0,32
Total	100,00	100,00

Sumber : Susenas, 2013

<http://pinrangkab.bps.go.id>



Bab IV

Pendidikan

Pendidikan menjadi kunci utama bagi kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Penyebab mendasar terjadinya keterbelakangan adalah kualitas sumberdaya manusia. Tingkat pendidikan yang rendah di suatu wilayah akan menghambat peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, politik dan kultural secara lebih efektif (Sen, 1999). Oleh sebab itu pembangunan manusia dalam bidang pendidikan perlu ditingkatkan demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

Menyadari pentingnya pendidikan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa yang bermartabat, maka dalam pembukaan UUD 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah turut mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya untuk meraih tujuan ini ditempuh dengan membentuk berbagai macam program pendidikan, seperti wajib belajar sembilan tahun, program kejar paket A, paket B, paket C, dan sebagainya. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, diharapkan pada masa mendatang pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik sehingga kesejahteraan rakyat secara menyeluruh dapat terwujud.

4.1. Angka Melek Huruf (AMH)

Salah satu tujuan nasional adalah memberantas buta huruf yang masih terjadi di masyarakat. Indikator keberhasilan tujuan tersebut adalah menurunnya angka buta huruf atau dengan kata lain meningkatnya angka melek huruf. Definisi melek huruf secara luas adalah kemampuan membaca dan menulis huruf latin maupun huruf lainnya tanpa harus mengerti makna kalimat yang dibaca dan ditulis.

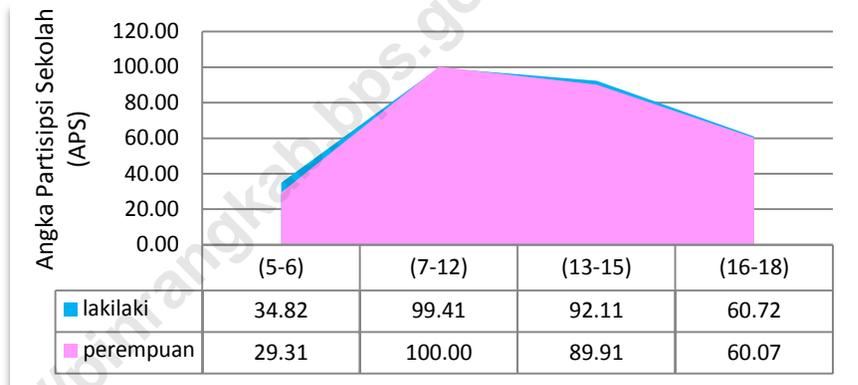


Gambar 7. Angka Melek Huruf (AMH) menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Pinrang Tahun 2013

Indikator Angka Melek Huruf (AMH) menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya terhadap keseluruhan penduduk usia 15 tahun ke atas. Kemampuan membaca dan menulis merupakan indikator dasar untuk mengukur tingkat pendidikan di suatu wilayah karena membaca dan menulis merupakan dasar utama untuk memperluas pengetahuan. AMH juga menjadi tolok ukur keberhasilan program pengentasan buta huruf yang digalakkan pemerintah baik pusat maupun daerah.

AMH Kabupaten Pinrang pada tahun 2013 sebesar 91,99. Berdasarkan jenis kelaminnya, AMH laki-laki lebih besar daripada perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat pendidikan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan sekaligus menunjukkan masih terjadinya diskriminasi pendidikan berdasarkan jenis kelamin.

4.2. Partisipasi Sekolah



Gambar 8. Angka Partipasi Sekolah (APS) Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Susenas 2013

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Selain itu, menunjukkan persentase penduduk kelompok umur tertentu yang sedang/masih bersekolah terhadap keseluruhan jumlah penduduk pada umur tersebut. Berdasarkan data Susenas tahun 2013 APS laki-laki lebih tinggi daripada APS perempuan pada kelompok

umur 5-6 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun. Sementara pada kelompok umur 7-12 tahun APS perempuan yang lebih tinggi dibanding APS laki-laki.

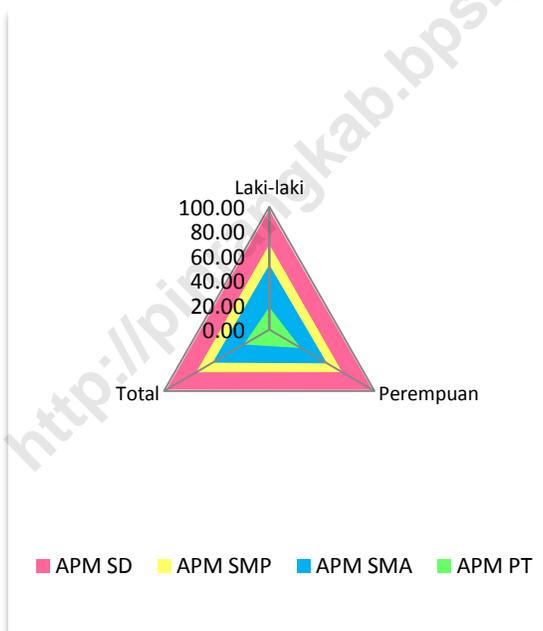
Disparitas APS laki-laki dan perempuan pada kelompok usia SMP dan SMA menunjukkan adanya diskriminasi pendidikan. Hal ini menguatkan kesimpulan yang diperoleh pada AMH yang telah dijelaskan pada sub bagian terdahulu. Kondisi ini menyiratkan sebagian orang tua memiliki pandangan bahwa anak laki-laki membutuhkan pendidikan yang tinggi untuk mencari pekerjaan sedangkan perempuan sudah cukup dengan pendidikan dasar saja.

APS untuk kelompok umur 5-6 sangat rendah baik pada laki-laki maupun perempuan yaitu hanya 29,31 untuk laki-laki dan 34,82 untuk perempuan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak pada pendidikan pra sekolah masih sangat kurang. Hal ini dapat disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini.

APS cenderung menurun seiring meningkatnya jenjang pendidikan. Urutan APS dari yang terbesar ke yang terkecil adalah APS 7-2 tahun, APS 13-15 tahun dan APS (16-18) tahun. Artinya, jumlah penduduk yang bersekolah SMP dan SMA lebih kecil dibandingkan pada saat SD. Hal ini menunjukkan bahwa kemauan masyarakat untuk memberikan pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi masih rendah. Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhinya adalah faktor ekonomi dan sosial budaya. Semakin tinggi jenjang pendidikan tentu biaya yang dibutuhkan juga semakin besar. Selain itu masih ada orang tua yang meminta anaknya untuk bekerja dan memperoleh pendapatan dibandingkan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

4.3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni atau APM adalah persentase siswa dengan umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan yang diduduki siswa tersebut terhadap jumlah penduduk pada umur yang sama. APM menunjukkan besarnya partisipasi sekolah dari penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu. APM juga merupakan indikator daya serap yang baik dari penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikannya.



Gambar 9. Angka Partisipasi Murni (APM) Penduduk Berumur 7-18 Tahun Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2013

Gambar 9 menunjukkan APM untuk SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi (PT). Setiap sudut pada segitiga menunjukkan nilai APM untuk tiap jenjang pendidikan dan jenis kelamin. Ada 4 segitiga dengan 4 warnayang berbeda. Semakin luas segitiga, semakin besar nilai APM untuk tiap kategori tersebut. Dari gambar 9 dapat diketahui bahwa urutan APM dari yang terbesar hingga terkecil adalah APM SD, APM SMP, APM SMA, dan yang terakhir APM Perguruan Tinggi (PT).

Data tersebut menunjukkan bahwa anak berusia (7-12) tahun yang seharusnya sekolah SD persentasenya lebih besar dibandingkan dengan anak berumur (13-15) tahun yang sekolah SMP, anak berumur (16-18) tahun yang seharusnya sekolah SMA, dan anak berumur 18 tahun lebih yang seharusnya masuk perguruan tinggi.

Artinya, semakin tinggi jenjang pendidikannya, daya serap penduduk yang bersekolah akan semakin kecil, dikarenakan berbagai macam faktor, baik ekonomi, sosial maupun lingkungan. Faktor lingkungan berpengaruh ketika keberadaan sekolah pada suatu wilayah cukup jauh dan sulit di akses. Hal ini akan membuat orang tua berpikir dua kali untuk menyekolahkan anaknya.

Tabel 4. Angka partisipasi murni (APM) Penduduk Laki-laki, perempuan, serta laki-laki dan perempuan Berumur 7-18 Tahun, 2013

APM	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
APM SD	97.57	97.99	97.77
APM SMP	69.53	69.24	69.38
APM SMA	52.94	54.77	53.74
APM PT	18.37	29.86	24.14

Sumber : Susenas, 2013

4.4. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia adalah tingkat pendidikan yang ditamatkan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang

ditamatkan, semakin baik kualitas sumber daya manusianya. Sehingga potensi sumber daya manusia dapat dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan.

Jika diurutkan, persentase STTB yang dimiliki penduduk Kabupaten Pinrang dari terbesar hingga terkecil adalah SD/MI, Tidak punya ijazah, SMP/MTs, SMA/MA, D IV/S1/S2/S3, SMK, Akademi/DIII, dan terakhir DI/II. Persentase penduduk yang tidak/belum pernah sekolah adalah 22,24 persen dan ini menunjukkan bahwa pada tahun 2013, hampir seperempat penduduk Pinrang tidak pernah atau tidak lulus SD.

Tabel 5. Persentase Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin 2013

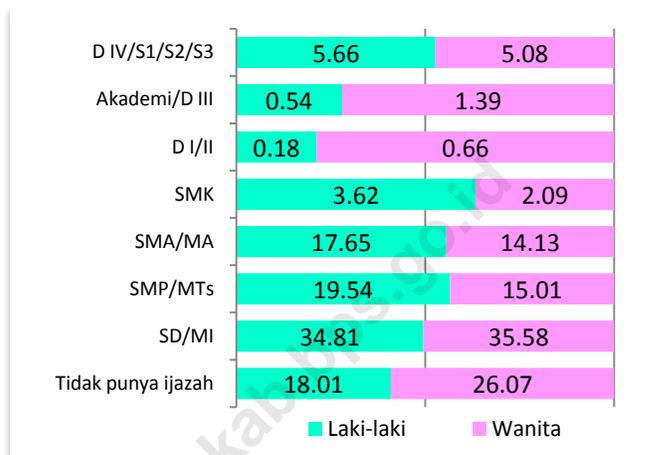
STTB Tertinggi yang dimiliki	Laki-laki	Wanita	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak punya ijazah	18.01	26.07	22.24
SD/MI	34.81	35.58	35.21
SMP/MTs	19.54	15.01	17.16
SMA/MA	17.65	14.13	15.80
SMK	3.62	2.09	2.82
D I/II	0.18	0.66	0.43
Akademi/D III	0.54	1.39	0.99
D IV/S1/S2/S3	5.66	5.08	5.35
Total	100.00	100	100

Sumber : Susenas, 2013

Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin kecil persentase Ijazah/STTB yang dimiliki. Persentase penduduk yang memiliki ijazah D IV/S1/S2/S3 lebih besar daripada yang memiliki ijazah D I/II. Seperti diketahui bahwa lulusan D IV/S1 lebih banyak dibutuhkan dalam persyaratan lowongan pekerjaan daripada lulusan D I/II, sehingga penduduk yang melanjutkan ke perguruan tinggi memilih langsung D IV/S1.

Menurut jenis kelaminnya, persentase laki-laki yang memiliki ijazah SMP/MTs, SMA/MA, SMK, dan D IV/S1/S2/S3 lebih besar dari perempuan.

Sementara persentase perempuan yang tidak memiliki ijazah, yang memiliki ijazah D I/II dan Akademi/D III.



Gambar 10. Persentase Ijazah/STTB yang dimiliki Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas Menurut Jenis Kelamin, 2013

<http://pinrangkab.bps.go.id>



Bab V

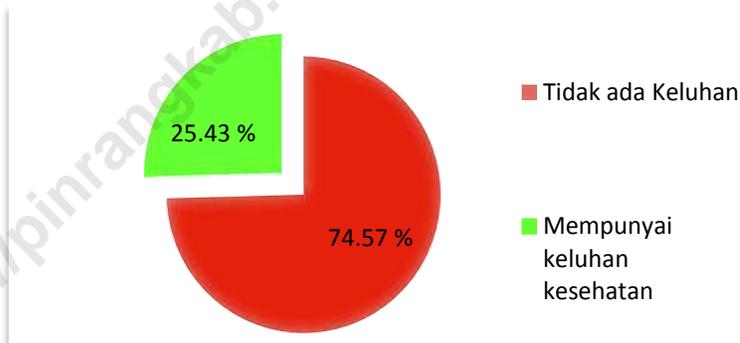
Kesehatan

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. Kesehatan merupakan keadaan sejahtera dari jiwa dan raga serta kehidupan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif. Masyarakat yang semakin sehat berarti produktifitasnya semakin meningkat. Hal ini akan sangat mendukung proses dan dinamika pembangunan di suatu wilayah.

Guna meningkatkan kesehatan masyarakat, berbagai upaya dilakukan pemerintah baik melalui pembangunan sarana-prasarana kesehatan maupun penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Upaya melalui pendidikan formal diantaranya adalah penerapan program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Program-program pembangunan pemerintah di bidang kesehatan berusaha meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, sehingga setiap penduduk dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau. Hal ini dilakukan dengan pembangunan rumah sakit-rumah sakit, puskesmas, polindes, BKIA, posyandu serta pemenuhan kebutuhan akan tenaga kesehatan dan obat-obatan

5.1. Angka Kesakitan/ Morbiditas

Angka kesakitan adalah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Konsep yang digunakan dalam Susenas, seseorang yang menderita penyakit kronis dianggap mempunyai keluhan kesehatan walaupun pada saat pencacahan, orang yang bersangkutan sedang tidak kambuh penyakitnya. Semakin besar angka kesakitan menunjukkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah semakin rendah.

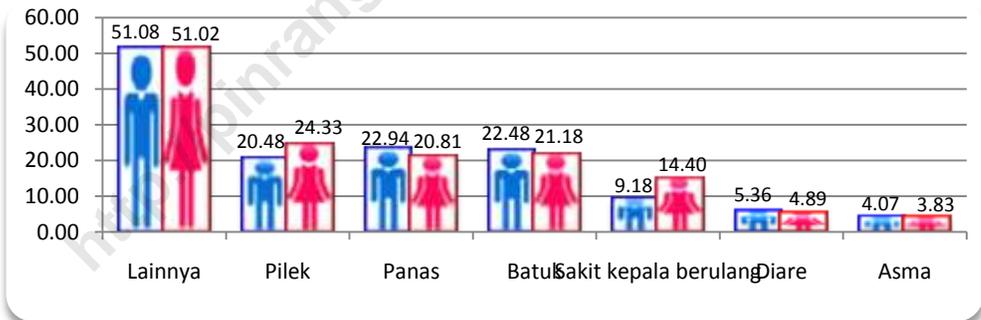


Gambar 11. Persentase Keluhan Kesehatan yang Diderita Selama Sebulan Terakhir, 2013

Gambar 11 menunjukkan 25,43 persen penduduk Kabupaten Pinrang mempunyai keluhan kesehatan. Sehingga angka kesakitan atau morbiditas untuk Kabupaten Pinrang tahun 2013 adalah 25,43 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat/derajat kesehatan masyarakat secara umum cukup baik.

Pada umumnya keluhan kesehatan utama yang dialami penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2013 adalah pilek (22,49 persen), panas (21,83 persen), batuk (21,80 persen), sakit kepala berulang (11,91 persen), diare (5,11 persen), asma (3,94 persen), dan sakit gigi (2,74 persen). Keluhan kesehatan Lainnya mencakup penyakit kronis seperti jantung, tekanan darah tinggi, asam urat, termasuk juga keluhan kesehatan karena kehamilan bagi wanita.

Rata-rata lama sakit penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2013 adalah 7,08 hari. Rata-rata lama sakit untuk laki-laki (7,81 hari) lebih tinggi daripada perempuan (6,36 hari). Persentase penduduk menurut lamanya hari sakit pada tahun 2013 berturut-turut adalah kurang dari sama dengan 3 hari (57,86 persen), 4-7 hari (20,88 persen), 22-30 hari (13,19 persen), 8-14 hari (7,11 persen) dan 15-21 hari (0,95 persen).



Gambar 12. Persentase Jenis Keluhan Kesehatan yang Diderita Penduduk Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin, 2013

Gambar 12 menunjukkan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan menurut jenis keluhan dan jenis kelamin pada tahun 2013. Untuk jenis keluhan kesehatan panas, batuk, diare dan asma lebih banyak

diderita oleh laki-laki. Sedangkan pilek, dan sakit kepala berulang lebih banyak dikeluhkan oleh perempuan.

Laki-laki memiliki harapan hidup yang lebih rendah daripada perempuan (Gustiawati, 2013). Disebutkan pula bahwa laki-laki memiliki beberapa sifat yang memicu hal tersebut, antara lain perilaku yang agresif dan membahayakan atau nekat, susah hidup sehat, serta makan berlebihan. Dua hal terakhir bahwa laki-laki kurang memperhatikan kesehatannya sehingga resiko untuk mengalami kesehatan pun semakin besar.

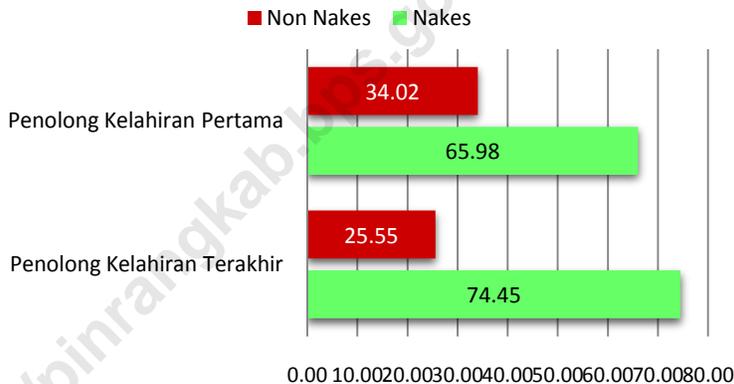
5.2. Penolong Persalinan

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan barometer pelayanan kesehatan di suatu wilayah. Data terakhir menunjukkan AKI di Indonesia adalah 228 per 100.000 kelahiran hidup. AKI dan AKB erat kaitannya dengan ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, dalam upaya menurunkan AKI dan AKB Indonesia menerapkan program *safe motherhood* dengan pilar utamanya adalah persalinan aman yang ditolong oleh tenaga kesehatan.

Pada pengumpulan data Susenas, diperoleh informasi tentang penolong kelahiran pertama dan terakhir. Penolong kelahiran pertama adalah orang yang membantu proses persalinan pertama kali. Sedangkan penolong kelahiran terakhir adalah orang yang membantu proses persalinan hingga bayi dilahirkan. Penolong persalinan pertama dan terakhir dapat berbeda jika penolong kelahiran pertama menemukan masalah dalam persalinan yang tidak dapat ditangani sehingga membutuhkan bantuan untuk penanganan lebih lanjut dalam

menangani proses persalinan. Oleh sebab itu, pada umumnya penolong kelahiran terakhir memiliki kemampuan dalam penanganan persalinan yang lebih baik dibandingkan penolong persalinan pertama.

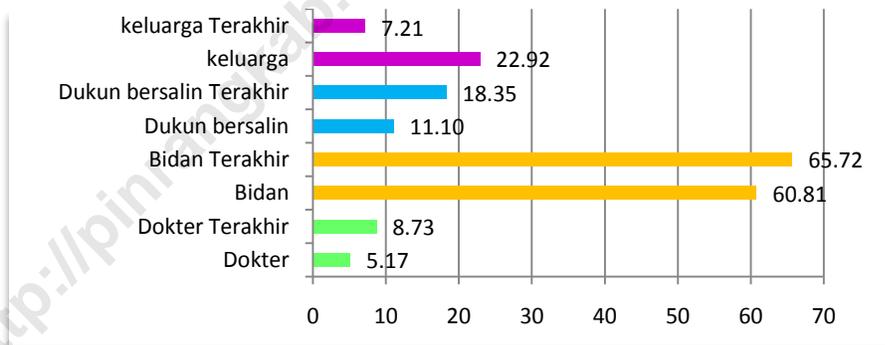
Informasi mengenai penolong kelahiran diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pelayanan kesehatan telah menjangkau masyarakat. Standar pelayanan minimal kesehatan 2010-2015 mensyaratkan 90 persen pertolongan persalinan dilakukan oleh Nakes yang memiliki kompetensi kebidanan.



Gambar 13. Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Penolong Kelahiran Terakhir, 2013

Data tahun 2013 menunjukkan bahwa di Kabupaten Pinrang target pelayanan minimal kesehatan 90 persen belum tercapai. Meskipun demikian penolong kelahiran, baik pertama maupun terakhir, lebih banyak dari tenaga kesehatan. Persentase penolong kelahiran pertama dari tenaga kesehatan adalah sebesar 65,98 persen. Sementara untuk penolong kesehatan terakhir sebesar 74,45 persen.

Persentase tertinggi penolong persalinan adalah Bidan yaitu 60,81 persen sebagai penolong persalinan pertama dan 65,72 persen sebagai penolong kelahiran terakhir. Diikuti kemudian dengan dukun bersalin yaitu sebesar 11,10 persen sebagai penolong persalinan pertama dan 18,35 persen sebagai penolong kelahiran terakhir. Yang harus menjadi perhatian adalah masih rendahnya persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh dokter. Persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh dokter sebagai penolong kelahiran pertama adalah sebesar 5,17 persen dan penolong kelahiran terakhir 8,73 persen. Di sisi lain persentase balita yang lahir dengan pertolongan keluarga masih cukup tinggi yaitu 22,92 persen pada penolong kelahiran pertama.



Gambar 14. Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran Pertama dan Penolong Kelahiran Terakhir, 2013

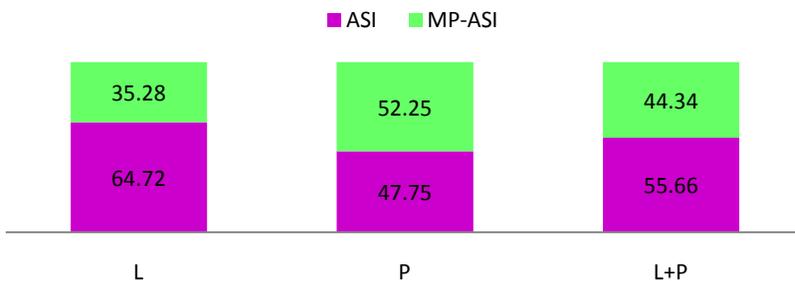
Untuk melihat lebih mendalam, maka dari selisih setiap penolong persalinan, dapat disimpulkan bahwa dari 15,71 persen balita yang ditolong oleh keluarga sebagai penolong persalinan pertama, sebesar 7,24 persen memilih penolong terakhir dukun bersalin; 4,91 persen memilih penolong terakhir bidan; dan 3,56 persen memilih penolong terakhir dokter.

5.3. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif

ASI merupakan makanan terbaik bagi bayi karena mengandung gizi lengkap yang diperlukan bagi tumbuh kembang bayi. Pemberian ASI pada bayi memiliki manfaat sangat besar untuk jangka panjang bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi untuk tumbuh kembang bayi tetapi juga memberi kekebalan terhadap berbagai macam penyakit. Oleh karena itu pemerintah menganjurkan setiap ibu untuk memberikan ASI eksklusif yaitu memberikan ASI kepada bayi sejak dilahirkan sampai menginjak usia enam bulan tanpa makanan dan minuman pralakteal lainnya seperti air gula, air mineral, madu dan sebagainya.

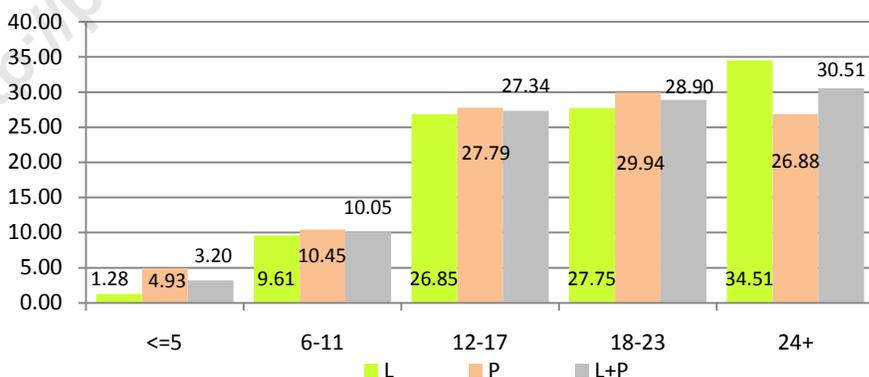
Pemberian ASI eksklusif selama enam bulan dapat mencegah anak dari risiko alergi dan asma. Selain itu ASI merupakan sumber lemak dan vitamin A yang tidak akan tergantikan oleh makanan sapihian apapun. Selanjutnya pemberian ASI tetap dilanjutkan sampai usia dua tahun bersama dengan pemberian makanan tambahan. Banyak ibu yang meragukan kemampuan ASInya ketika menginjak tahun kedua menyusui. Padahal pada saat itu, kandungan faktor imunitas ASI, kandungan lemak dan energi meningkat dalam jumlah sangat besar (UNICEF, 2009).

Berdasarkan data Susenas 2013 (Gambar 15), diketahui bahwa 44,34 persen ibu tidak hanya memberikan ASI, tetapi juga Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) untuk bayinya. Artinya masih banyak ibu yang meragukan kemampuan ASI untuk memenuhi kebutuhan nutrisi bayinya.



Gambar 15. Persentase anak 2-4 tahun menurut pemberian ASI, 2013

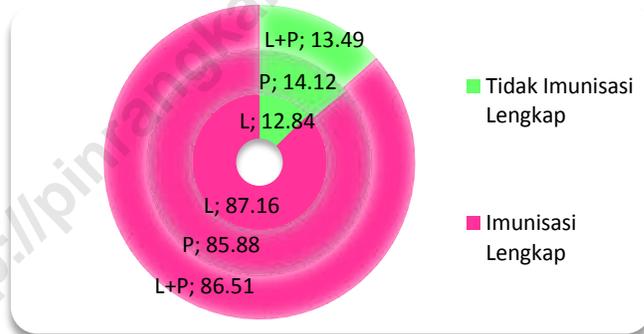
Sementara itu, menurut lamanya menyusui sebanyak 30,51 persen anak disusui selama 2 tahun atau lebih; 28,90 persen disusui selama 18-23 bulan; 27,34 persen disusui selama 12-17 bulan; 10,05 persen disusui selama 6-11 bulan, dan sisanya 3,2 persen anak hanya disusui kurang dari 6 bulan. Terlihat bahwa masih ada ibu yang menyusui anaknya kurang dari 6 bulan, serta masih banyak ibu yang tidak mengetahui pentingnya menyusui hingga usia anaknya mencapai dua tahun.



Gambar 16. Persentase lamanya menyusui dari anak berumur 2-4 tahun, 2013

5.4. Imunisasi

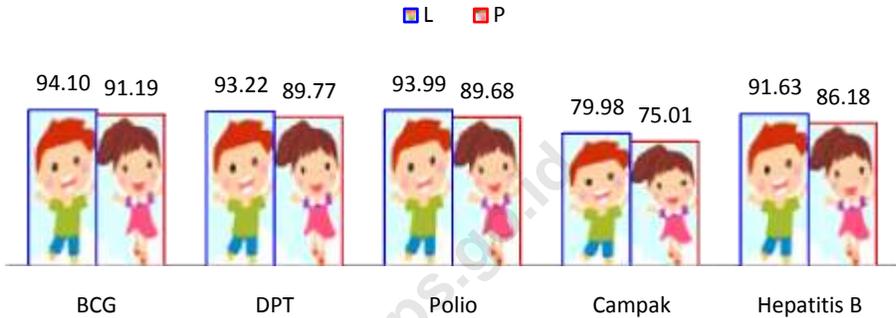
Imunisasi merupakan investasi kesehatan masa depan. Pencegahan penyakit melalui imunisasi merupakan cara perlindungan paling efektif, terutama dari segi pembiayaan, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Program imunisasi nasional pada anak sangat efektif mencegah penyakit dan kematian dari penyakit menular seperti campak, polio, dan meningitis. Namun demikian, sampai saat ini masih terdapat masalah-masalah dalam pemberian imunisasi, antara lain pemahaman orang tua yang masih kurang, mitos yang salah tentang imunisasi, serta jadwal imunisasi yang terlambat.



Gambar 17. Persentase Anak Berumur 1-4 Tahun Menurut Pemberian Imunisasi, 2013

86,51 persen anak berumur 1-4 tahun di Kabupaten Pinrang telah diimunisasi lengkap, sementara sisanya 13,49 persen tidak diimunisasi lengkap oleh orang tuanya. Alasan yang dikemukakan orang tua untuk tidak melengkapi imunisasi sebagian besar adalah anak sering sakit (misalnya demam dan

batuk/pilek) setelah diberikan imunisasi, dan masih ada yang menyatakan karena cemas/takut dan tidak tahu (Juniatiningsih dan Soedibyo, 2007).



Gambar 18. Persentase Balita Menurut Pemberian Imunisasi dan Jenis Kelamin, 2013

Jenis imunisasi yang paling sedikit diberikan kepada anak adalah imunisasi campak, pada anak laki-laki sebesar 79,98 persen, dan anak perempuan 75,01 persen. Sedangkan untuk jenis imunisasi yang lain persentase cakupannya berada di atas 90 persen. Penyebab rendahnya cakupan imunisasi campak salah satunya disebabkan karena Kabupaten Pinrang memiliki beberapa wilayah yang cukup terpelosok, sulit dijangkau dengan tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat akan imunisasi yang masih rendah.

<http://pinrangkab.bps.go.id>



Bab VI

Ketenagakerjaan

Salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan, di samping keadaan angkatan kerja (*economically active population*) dan struktur ketenagakerjaan adalah isu pengangguran. Dari sisi ekonomi, pengangguran muncul sebagai akibat kesenjangan antara SDM dan SDA dengan ketersediaan lapangan kerja. Jumlah tenaga kerja semakin meningkat seiring pertumbuhan penduduk sedangkan lapangan kerja yang tersedia terbatas, akibatnya pengangguran akan semakin meningkat. Tingginya angka pengangguran tidak hanya menimbulkan masalah di bidang ekonomi, melainkan juga menimbulkan berbagai masalah di bidang sosial, seperti kemiskinan dan kerawanan sosial.

Untuk mengatasi persoalan pengangguran, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja sesuai pertumbuhan angkatan kerja dengan mendorong pertumbuhan industri-industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Selain itu kualitas SDM juga harus ditingkatkan kualitasnya agar memenuhi kebutuhan industri. Masyarakat juga perlu didorong untuk memiliki jiwa *entrepreneurship* sehingga masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.

Data dan informasi ketenagakerjaan diperlukan oleh penentu kebijakan untuk menyusun strategi dan program ketenagakerjaan dalam rangka pembangunan dan pemecahan masalah ketenagakerjaan. Bab ini menjelaskan

beberapa indikator ketenagakerjaan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi terkini ketenagakerjaan di Kabupaten Pinrang. Data-data yang ditampilkan bersumber dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dilaksanakan setiap triwulan pada tahun 2013.

6.1. Konsep Ketenagakerjaan

Konsep dalam bidang ketenagakerjaan yang digunakan oleh BPS membagi penduduk menjadi dua kelompok besar yaitu penduduk usia kerja dan bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja terdiri atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja meliputi penduduk yang bekerja dan pengangguran. Termasuk dalam kelompok bekerja adalah penduduk usia kerja yang statusnya bekerja, sementara tidak bekerja (karena menunggu panen, sedang cuti atau sedang menunggu pekerjaan berikutnya).

Menurut jam kerjanya, penduduk bekerja dibedakan menjadi penduduk yang bekerja sesuai jam kerja normal yaitu minimal 35 jam per minggu dan mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal, atau disebut setengah menganggur. Penduduk yang termasuk dalam kelompok pengangguran adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan ataupun mempersiapkan suatu usaha. Termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang kegiatan utamanya bersekolah atau mengurus rumah tangga. Lebih jelasnya, klasifikasi penduduk dalam konsep ketenagakerjaan dijelaskan dalam diagram berikut.



Gambar 19. Diagram Ketenagakerjaan, BPS

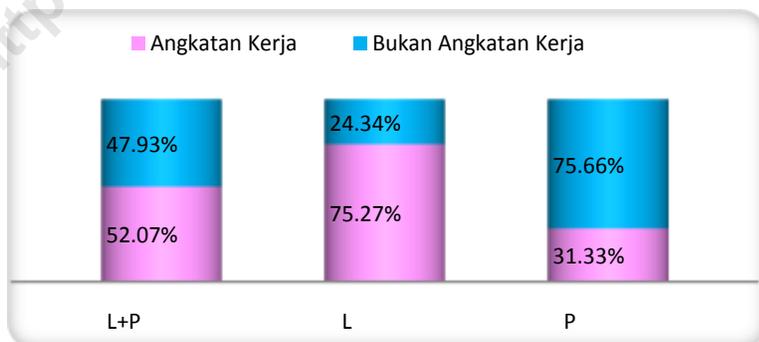
6.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase angkatan kerja terhadap seluruh penduduk usia kerja (15 tahun keatas). TPAK adalah salah satu ukuran yang dapat menggambarkan partisipasi penduduk usia kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Indikator ini menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian.

Berdasarkan gambar 20, dari keseluruhan penduduk usia kerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2013 sebanyak 52,07 persen atau 126.453 jiwa

adalah angkatan kerja, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 47,93 persen atau 116.418 jiwa bukan termasuk angkatan kerja. Dari total 116.418 jiwa bukan angkatan kerja, sebanyak 47,9 persennya (74.326 jiwa) adalah penduduk yang kegiatan utamanya mengurus rumah tangga (74.326 penduduk) sementara yang bersekolah terdapat sebanyak 22,87 persen atau 26.622 jiwa dan lainnya sebanyak 13,29 persen atau 15.470 jiwa. Lainnya disini termasuk mereka yang berada dalam usia kerja tetapi tidak dapat bekerja karena cacat dsb.

TPAK Kabupaten Pinrang tahun 2013 adalah 52,07 persen, artinya dari setiap 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 52 diantaranya yang termasuk angkatan kerja. Angka ini menurun 2,89 persen dibandingkan tahun 2012 (54,96 persen). Sementara itu, menurut jenis kelamin TPAK laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan yaitu 75,27 persen untuk laki-laki dan 31,33 persen untuk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar laki-laki usia 15 tahun ke atas aktif secara ekonomi dengan bekerja atau sedang mencari pekerjaan, sebaliknya perempuan lebih banyak yang tidak bekerja atau mencari pekerjaan.



Gambar 20. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Laki-laki dan Perempuan, Laki-laki, dan Perempuan, 2013

TPAK laki-laki tahun 2013 cenderung sama dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, TPAK perempuan menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 36,79 persen pada tahun 2012 menjadi 31,33 persen pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi perempuan untuk aktif dalam perekonomian menurun 5,46 persen.

Berdasarkan klasifikasi wilayah, TPAK di Kabupaten Pinrang untuk daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Ini sesuai dengan karakteristik Kabupaten Pinrang sebagai sentra pertanian padi. Namun TPAK untuk wilayah pedesaan menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu dari 74,55 persen pada tahun 2012 menjadi 72,31 persen pada tahun 2013. Demikian sebaliknya untuk wilayah perkotaan mengalami peningkatan dari 25,45 persen pada tahun 2012 menjadi 27,69 persen pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran tenaga kerja dari pedesaan ke perkotaan

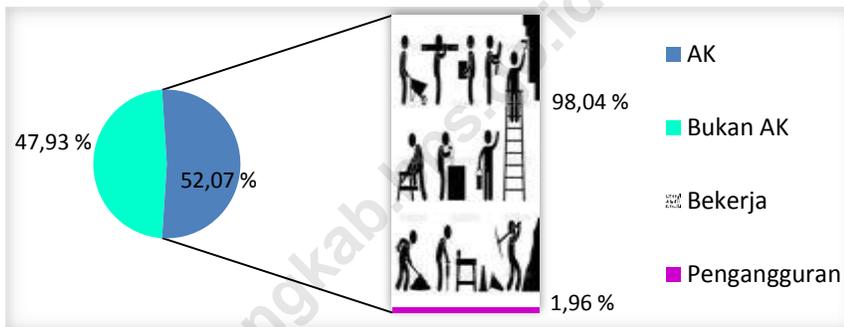
Tabel 6. TPAK Kabupaten Pinrang Menurut Wilayah dan Jenis Kelamin, Tahun 2012-2013

Klasifikasi		2012	2013
(1)		(2)	(3)
Jenis Kelamin	Laki-laki	75.26	75.27
	Perempuan	36.79	31.33
Wilayah	Perkotaan	25.45	27.69
	Pedesaan	74.55	72.31

6.3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Gambar 21 menunjukkan dari seluruh angkatan kerja terdapat 98,04 persen penduduk yang bekerja dan 1,96 persen menganggur. Penduduk yang

bekerja meliputi penduduk yang sedang bekerja dan sementara tidak bekerja. Sementara itu, penduduk yang menganggur meliputi pengangguran pernah bekerja, dan pengangguran tidak pernah bekerja. Angka 1,96 persen merupakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang berarti bahwa pada tahun 2013 terdapat 1,96 persen angkatan kerja di Kabupaten Pinrang yang tidak terserap pada pasar kerja.



Gambar 21. Jumlah Penduduk 15 Tahun Keatas yang Termasuk Angkatan Kerja, 2013

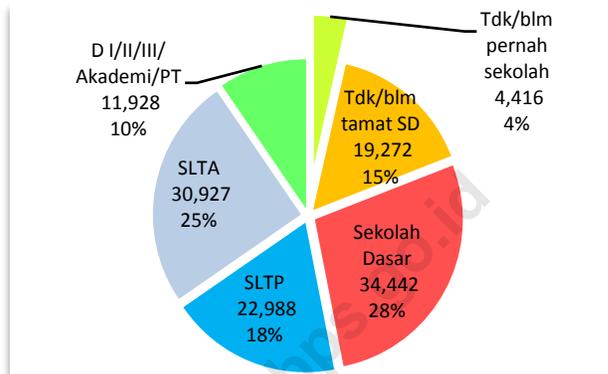
Berdasarkan wilayahnya, TPT di perkotaan lebih tinggi di pedesaan. TPT Kabupaten Pinrang tahun 2013 untuk perkotaan adalah 4,16 persen sementara di pedesaan adalah 1,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa angkatan kerja di Kabupaten Pinrang di perkotaan lebih sulit memperoleh pekerjaan. Jika dirinci menurut kelompok umur, TPT tertinggi berada pada kelompok umur 15-19 tahun yaitu 8,6 persen. Pada usia tersebut umumnya pendidikan tertinggi yang ditamatkan adalah SMP atau SMA dan sederajat. Hal ini dikuatkan dengan data TPT menurut tingkat pendidikan dimana TPT tertinggi terdapat pada tingkat pendidikan SMP (4,85 persen) dan SMA (2,54 persen).

Kondisi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut. Karakteristik perekonomian di Kabupaten Pinrang didominasi oleh sektor pertanian terutama pertanian tanaman pangan. Pada sektor primer seperti pertanian, tenaga kerja yang diperlukan adalah buruh kasar sehingga mayoritas tenaga kerja di sektor primer memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini menjelaskan mengapa pada wilayah sentra pertanian angkatan kerja dengan pendidikan rendah lebih mudah memperoleh pekerjaan, terutama di pedesaan. Selain itu, semakin tinggi tingkat pendidikan, pencari kerja mengharapkan pekerjaan yang lebih baik, dari sisi upah maupun jenis pekerjaan. Di sisi lain, lapangan pekerjaan di sektor non pertanian mensyaratkan tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Adanya *mismatch* antara angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan ini mengakibatkan tingginya angka pengangguran pada tingkat pendidikan SMP dan SMA di Kabupaten Pinrang.

6.4. Bekerja

Konsep bekerja yang digunakan dalam pengumpulan data ketenagakerjaan oleh BPS adalah bekerja minimal satu jam berturut-turut selama seminggu. Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2013 adalah 80.369 jiwa. Menurut pendidikan terakhir yang ditamatkan, penduduk yang bekerja dan memiliki pendidikan terakhir SD sebanyak 28 persen, SMA 25 persen, SMP 18 persen, tidak tamat SD 15 persen, Perguruan Tinggi 10 persen dan tidak/ belum pernah sekolah sebanyak 4 persen (Gambar 22). Dapat disimpulkan bahwa penduduk

Kabupaten Pinrang yang bekerja mayoritas hanya tamat pendidikan dasar dan menengah.

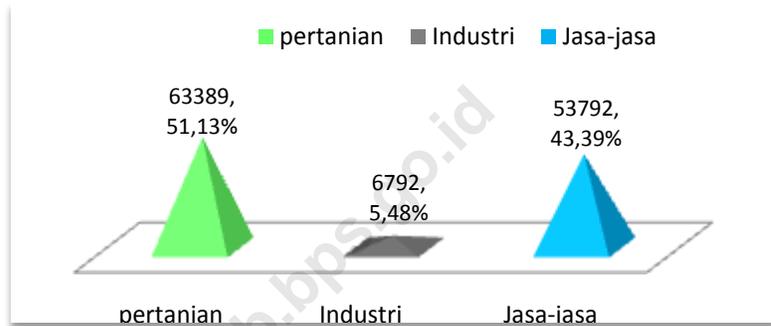


Gambar 22. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan, 2013

Distribusi penduduk yang bekerja dalam publikasi ini dibagi menjadi tiga sektor utama yaitu pertanian, industri dan jasa-jasa. Pertanian meliputi pertanian tanaman pangan dan pertanian lainnya, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Industri meliputi industri pengolahan, pertambangan dan penggalan, listrik, gas dan air, serta bangunan/konstruksi. Jasa-jasa meliputi perdagangan besar dan eceran, rumah makan, hotel dan restoran, angkutan, pergudangan, jasa perseorangan, jasa pemerintahan dan jasa kemasyarakatan.

Berdasarkan gambar 23, sebagian besar tenaga kerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2013 bekerja di sektor pertanian yaitu sebanyak 51,13 persen. Tenaga kerja yang bekerja di sektor jasa-jasa sebanyak 43,39 persen, sementara yang bekerja di sektor industri hanya 5,48 persen. Dibandingkan kondisi tahun 2012, tidak terdapat pergeseran distribusi tenaga kerja. Kabupaten

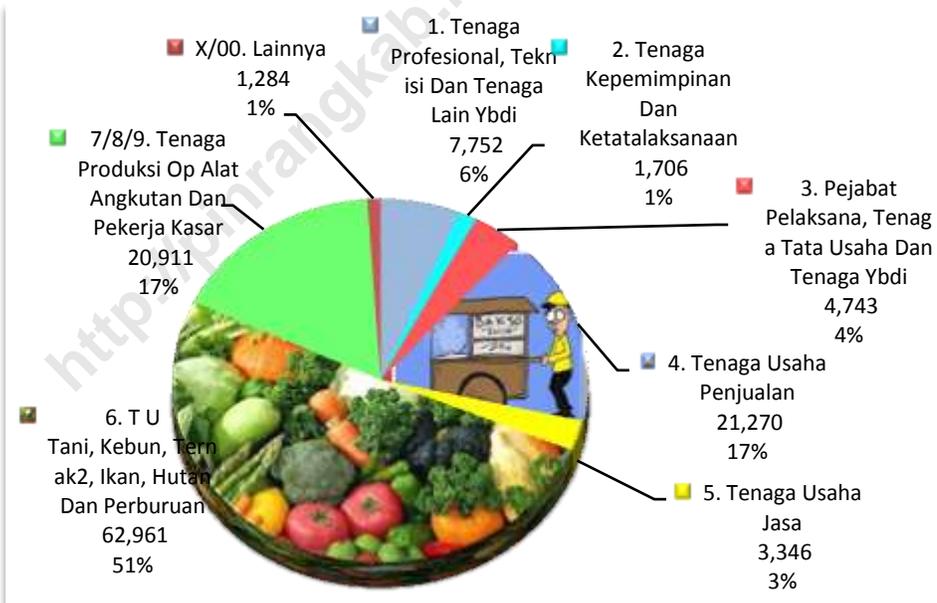
Pinrang merupakan daerah sentra pertanian, terutama komoditi beras, sehingga sebagian besar tenaga kerja terserap di sektor pertanian. Hal ini juga didukung oleh karakteristik tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan dimana sebagian besar berpendidikan rendah.



Gambar 23. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, 2013

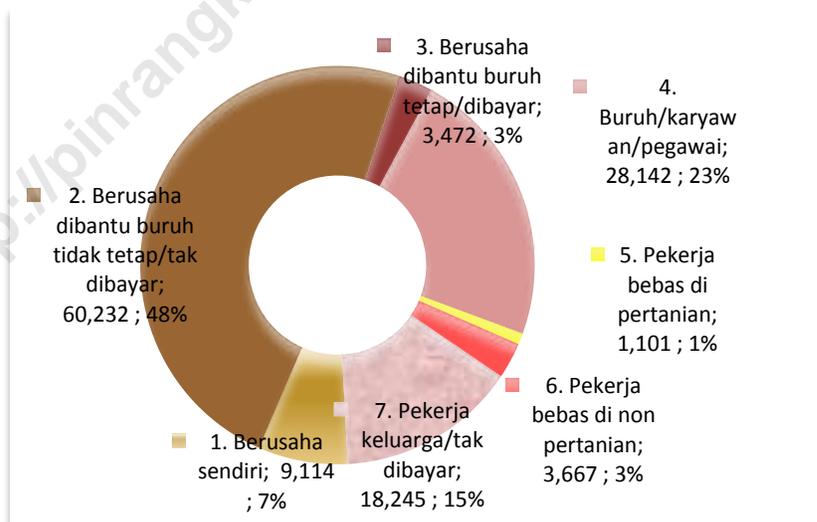
Berdasarkan wilayahnya, distribusi tenaga kerja di perkotaan sebagian besar bekerja di sektor jasa yaitu sebesar 79,77 persen, sedangkan di wilayah pedesaan sebagian besar bekerja di sektor pertanian yaitu sebesar 57,27 persen. Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin sebagian besar tenaga kerja laki-laki 55,78 persen, bekerja di sektor pertanian. Hal ini sesuai dengan karakteristik jenis pekerjaan di sektor pertanian yang membutuhkan tenaga besar. Tenaga kerja perempuan sebagian besar bekerja di sektor jasa-jasa yaitu sebanyak 76,36 persen dari total tenaga kerja perempuan. Pekerjaan di sektor jasa-jasa, seperti perdagangan, hotel dan restoran maupun jasa kemasyarakatan lebih sesuai bagi perempuan karena sifat perempuan yang lebih teliti dan sabar dalam melayani pengguna jasa.

Jika dilihat lebih mendalam, berdasarkan gambar 24 dapat diketahui bahwa jenis pekerjaan utama tenaga kerja di Kabupaten Pinrang adalah tenaga usaha tani, kebun, ternak, ikan, hutan, dan perburuan yaitu sebanyak 51 persen. Hal ini sesuai dengan lapangan usaha utama yang dijelaskan sebelumnya yaitu sektor pertanian. Persentase kedua terbesar yaitu 17 persen penduduk menjadi tenaga operasional alat angkutan serta tenaga usaha penjualan. Kondisi ini juga sejalan dengan karakteristik lapangan usaha di Kabupaten Pinrang dimana 43,39 persen tenaga kerja bekerja di sektor jasa-jasa termasuk perdagangan dan jasa angkutan yang memerlukan tenaga penjualan dan tenaga operasional kendaraan.



Gambar 24. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan Utama, 2013

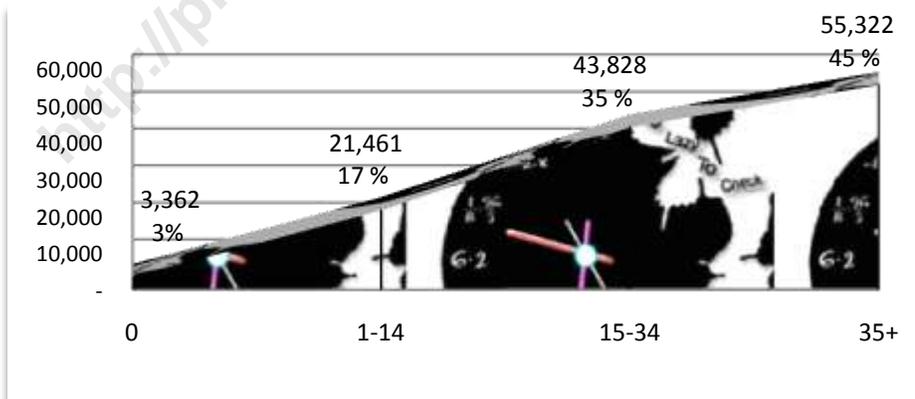
Distribusi penduduk bekerja di Kabupaten Pinrang tahun 2013 menurut status pekerjaan utama ditunjukkan dalam gambar 25. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tak dibayar memiliki persentase terbesar dalam status pekerjaan utama penduduk yang bekerja, yaitu 48 persen. Status dalam pekerjaan utama ini erat kaitannya dengan bidang pekerjaan utama yaitu sektor pertanian. Para petani umumnya bekerja dengandibantu oleh buruh tak dibayar yang merupakan pekerja keluarga. Oleh karena itu persentase pekerja keluarga juga cukup besar yaitu 15 persen atau menempati urutan ketiga terbesar. Sementara untuk urutan kedua terbanyak adalah buruh/karyawan atau pegawai yaitu sebesar 23 persen. Hal ini mungkin disebabkan oleh banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor jasa-jasa yang umumnya adalah buruh/karyawan.



Gambar 25. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, 2013

6.5. Jumlah Jam Kerja

Terkait dengan jumlah jam kerja yang dihabiskan selama seminggu, dapat diperoleh indikator pengangguran terselubung atau setengah pengangguran yaitu bagian dari angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Proporsi jumlah penduduk setengah pengangguran bermanfaat untuk dijadikan acuan pemerintah dalam rangka meningkatkan tingkat utilisasi, kegunaan, dan produktivitas pekerja. Semakin tinggi tingkat setengah pengangguran maka semakin rendah tingkat utilisasi pekerja dan produktivitasnya. Akibatnya, pendapatan mereka pun rendah dan tidak ada jaminan sosial atas mereka. Hal ini sering terjadi di sektor informal yang rentan terhadap kelangsungan pekerja, pendapatan dan tidak tersedianya jaminan sosial. Sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan untuk meningkatkan kemampuan bekerja mereka seperti penambahan balai latihan kerja.



Gambar 26. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Selama Seminggu, 2013

Menurut jumlah jam kerja selama seminggu diketahui bahwa 45 persen pekerja di Kabupaten Pinrang pada tahun 2013 bekerja 35 jam atau lebih, 35 persen bekerja 15 sampai 34 jam, 17 persen bekerja 1 sampai 14 jam, dan sisanya 3 persen sementara tidak bekerja selama seminggu yang lalu. Dengan demikian tingkat pengangguran terselubung di Kabupaten Pinrang pada tahun 2013 adalah 55 persen. Tingkat pengangguran terselubung yang cukup tinggi ini kemungkinan dipengaruhi oleh tingginya pekerja keluarga dan buruh tidak dibayar.

<http://pinrangkab.bps.go.id>



Bab VII

Fasilitas Perumahan

Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia selain sandang, pangan, dan kesehatan. Pentingnya rumah dapat dilihat dari fungsinya sebagai tempat tinggal, tempat istirahat, tempat berlindung dari hujan dan panas dan tempat berlangsungnya proses sosialisasi bagi semua anggota rumah tangga. Keberadaan rumah dan fasilitasnya dapat mempengaruhi tingkat kesehatan anggota rumah tangga sekaligus menunjukkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Semakin baik rumah dan fasilitas yang dimiliki, dapat diasumsikan semakin baik pula tingkat kesehatan dan tingkat kesejahteraan penghuninya. Di dalam bab ini akan disajikan beberapa aspek mendasar dari rumah yang berkaitan dengan struktur bangunan perumahan dan fasilitas perumahan tersebut.

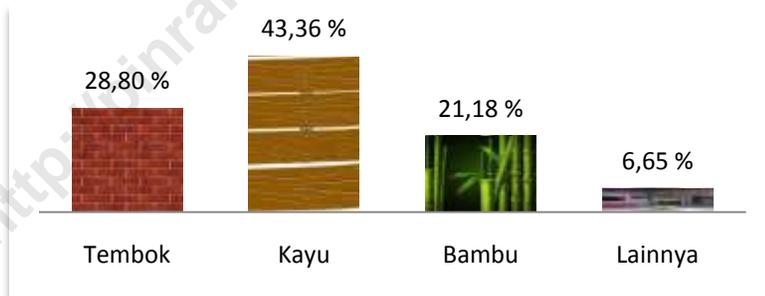
7.1. Kualitas Rumah Tinggal

Rumah yang berkualitas adalah rumah yang memenuhi syarat tertentu dilihat dari beberapa aspek, seperti luas lantai per kapita, jenis lantai, dinding dan atap yang digunakan. Rumah yang dikategorikan sebagai rumah layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu. Diantara persyaratan itu adalah dinding terluas terbuat dari tembok atau kayu, atap dari

beton, genteng, sirap, seng ataupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah.

7.1.1 Jenis Dinding Rumah

Selain persyaratan jenis dinding, rumah yang layak huni juga harus memenuhi persyaratan tidak lembab dan tidak tembus angin, hal ini disebutkan dalam publikasi Indikator Perumahan dan Kesehatan Lingkungan BPS. Sebagian besar (72,16 persen) masyarakat Kabupaten Pinrang sudah tinggal di dalam rumah dengan dinding yang layak. Sesuai dengan rumah adat suku Bugis dan Makassar yang merupakan suku bangsa mayoritas di Kabupaten Pinrang, sebagian besar rumah penduduk di Kabupaten Pinrang berupa rumah panggung. Oleh karena itu, sebagian besar rumah tangga memiliki dinding terluas berupa kayu yaitu sebanyak 43,36 persen (Gambar 27).



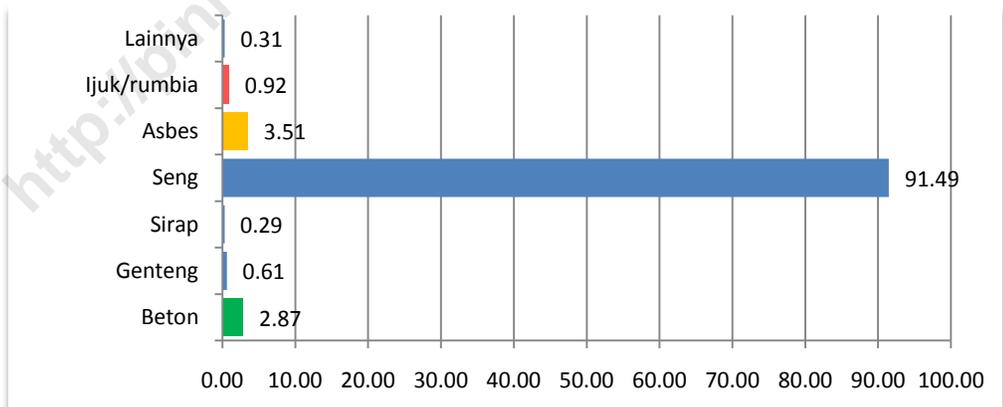
Gambar 27. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Dinding Terluas, 2013

Akibat harga kayu yang semakin mahal dan produksi kayu yang semakin menurun, sebagian penduduk beralih membangun rumah tembok. Pada tahun 2013 terdapat 28,80 persen rumah tangga di Kabupaten Pinrang yang tinggal di rumah dengan dinding terluas tembok. Bahan lain yang banyak

digunakan sebagai dinding di Kabupaten Pinrang adalah bambu sebanyak 21,18 persen dan lainnya, termasuk seng, sebanyak 6,65 persen lainnya. Jenis dinding bambu dan seng, biasanya digunakan oleh rumah tangga yang kurang mampu mengingat biaya yang diperlukan untuk kedua jenis material tersebut lebih murah dari pada kayu dan tembok.

7.1.2 Jenis Atap

Salah satu fungsi atap adalah untuk melindungi penghuni rumah dari cuaca panas dan hujan. Berdasarkan gambar 28, mayoritas rumah tangga di Kabupaten Pinrang tinggal di dalam rumah yang menggunakan atap layak (98,77 persen). Jenis atap seng paling banyak digunakan oleh penduduk Kabupaten Pinrang karena atap jenis ini paling sesuai dengan konstruksi rumah panggung yang berdinding kayu.

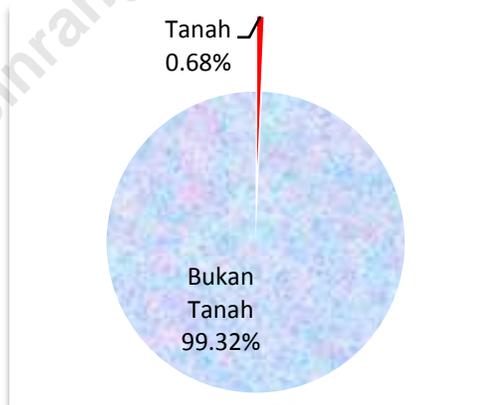


Gambar 28. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Atap Terluas, 2013
Persentase rumah tangga dengan jenis atap rumah terluas seng adalah 91,49 persen (Gambar 28). Jenis atap berikutnya yang cukup banyak digunakan

adalah asbes, digunakan oleh 3,51 persen rumah tangga, dan beton yang digunakan oleh 2,87 persen rumah tangga.

7.1.3 Jenis dan Luas Lantai

Jenis lantai rumah dapat mempengaruhi kondisi kesehatan anggota rumah tangga. Mayoritas rumah tanggadi Kabupaten Pinrang jenis lantai terluasnya bukan tanah yaitu sebanyak 99,32 persen. Persentase rumah tangga dengan jenis lantai bukan tanah meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Lantai bukan tanah terdiri dari marmer/keramik/granit (16,87 persen), tegel/teraso(2,5 persen), semen (14,88 persen), dan kayu (64,84 persen). Masih terdapat 0,68 persen rumah tangga yang tinggal di dalam rumah yang berlantaikan tanah.

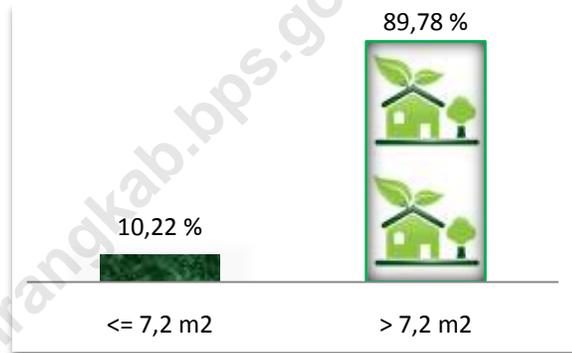


Gambar 29. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Lantai Terluas, 2013

Luas lantai rumah menentukan tingkat kesehatan penghuninya karena luas lantai yang sempit dapat mengurangi konsumsi oksigen dan mempercepat proses penularan penyakit. Luas lantai per kapita merupakan indikator untuk

menghitung rumah kumuh. Semakin besar luas lantai per kapita, semakin baik tingkat kesejahteraan rumah tangga di wilayah tersebut.

Luas lantai per kapita adalah luas lantai rumah dibagi dengan jumlah anggota rumah tangga (ART). Dengan asumsi, setiap rumah tangga terdiri dari 5 art dan menurut UU Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan, luas hunian minimum rumah adalah 36 m², maka luas minimum perkapita adalah 7,2 m² (BPS).



Gambar 30. Persentase Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Per Kapita, 2013

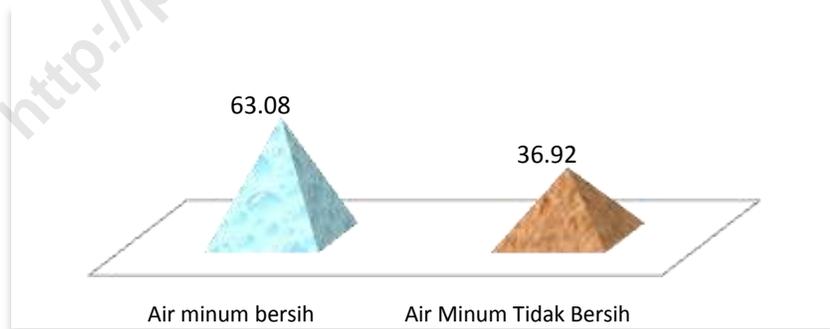
Di Kabupaten Pinrang, sebesar 89,78 persen rumah tangga memiliki luas lantai per kapita lebih dari 7,2 m². Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga telah memiliki hunian layak. Namun masih terdapat 10,22 persen rumah tangga yang luas lantai per kapitanya kurang dari 7,2 m². Hal ini menunjukkan masih terdapat rumah tangga yang huniannya kumuh.

7.2. Fasilitas Rumah

Ketersediaan fasilitas rumah menentukan kenyamanan penghuninya, tingkat kesehatan, dan kemudahan dalam beraktifitas. Fasilitas yang penting agar rumah menjadi nyaman dan sehat untuk dijadikan tempat tinggal antara lain tersedianya air minum bersih, sumber penerangan listrik, dan jamban sendiri dengan tangki septik/SPAL.

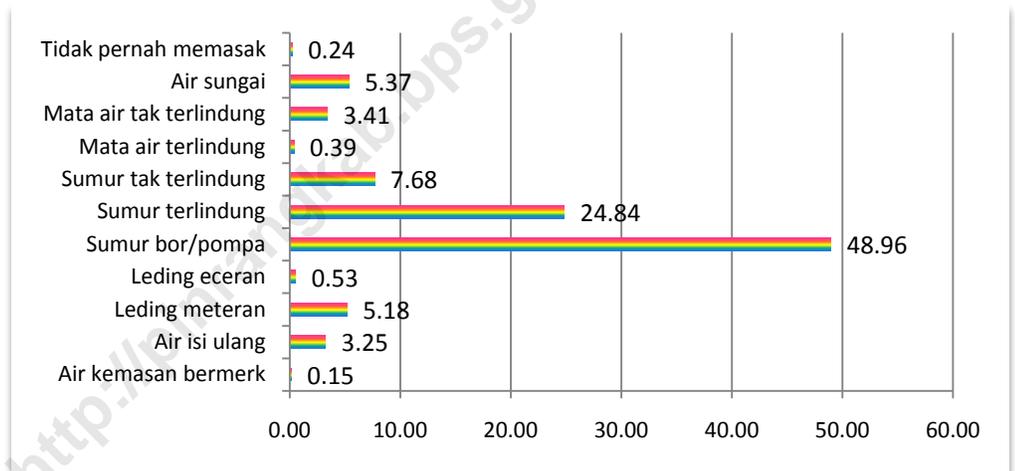
7.2.1. Air Minum Bersih

Salah satu fasilitas yang harus dipenuhi sebagai syarat dari rumah sehat adalah air minum bersih. Sumber air minum yang termasuk kategori air bersih yaitu air ledeng, air hujan, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung. Khusus untuk sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung harus berjarak 10 meter atau lebih, dari tempat penampungan tinja/limbah/kotoran terdekat agar dapat dikatakan layak. Sebagian besar (63,08 persen) warga Kabupaten Pinrang telah menggunakan sumber air minum bersih, sementara 36,92 persen lagi tidak mendapatkan air bersih.



Gambar 31. Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Air Minum, 2013

Kualitas air bersih dapat dilihat dari sumbernya. Sumber air minum menurut derajat kualitasnya berturut-turut adalah air kemasan/isi ulang, leding, pompa, sumur (sumur terlindung dan sumur tak terlindung), mata air (mata air terlindung, dan mata air tak terlindung), air sungai dan lainnya. Untuk rumah tangga yang menggunakan sumber air minum dari pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung harus memperhatikan jaraknya, dari tempat pembuangan akhir tinja. Jarak yang terbaik adalah diatas 6 meter dari tempat pembuangan tinja.

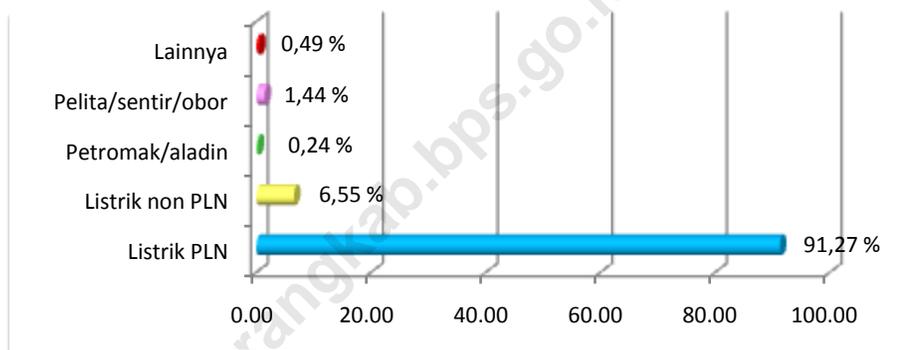


Gambar 32. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air untuk Memasak, 2013

Persentase terbesar sumber air untuk memasak yang dipakai oleh penduduk di Kabupaten Pinrang pada tahun 2013 adalah sumur bor/pompa sebesar 48,96 persen. Selanjutnya, sumber air untuk memasak yang juga banyak digunakan adalah sumur terlindung 24,84 persen, sumur tak terlindung 7,68 persen.

7.2.2. Sumber Penerangan Listrik

Sumber penerangan yang dapat digunakan sebagai fasilitas penerangan diantaranya listrik (PLN dan non PLN), petromak, aladin, pelita, sentir, obor dan lainnya. Listrik merupakan sarana yang cukup penting untuk rumah tangga yaitu sebagai sumber penerangan dan merupakan kebutuhan penting masyarakat.

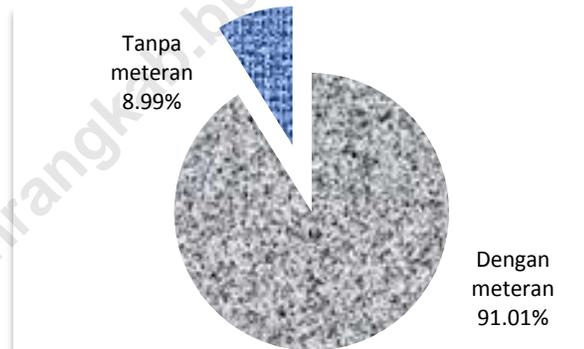


Gambar 33. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan Listrik, 2013

Pengguna listrik di Kabupaten Pinrang terdiri atas 91,27 persen listrik PLN, dan 6,55 persen listrik non PLN. Listrik non PLN umumnya digunakan oleh rumah tangga di daerah yang memiliki akses terbatas seperti beberapa desa di Kecamatan Lembang. Listrik non PLN umumnya bersumber dari swadaya masyarakat atau bantuan lembaga internasional. Sumber tenaga listrik non PLN di Kabupaten Pinrang adalah kincir air. Masih terdapat 2,18 persen rumah tangga yang tidak menggunakan listrik di Kabupaten Pinrang pada tahun 2013. Beberapa wilayah di Kabupaten Pinrang yang tergolong daerah sulit memang

belum terjangkau listrik. Sehingga untuk kehidupannya mereka masih menggunakan penerangan tradisional.

Dari seluruh rumah tangga pengguna listrik PLN di Kabupaten Pinrang pada tahun 2013, sebanyak 91,01persen memakai meteran, sedangkan 8,99 persen tidak menggunakan meteran. Berdasarkan daya yang terpasang, pengguna listrik PLN yang menggunakan meteran dengan daya terpasang 450 watt sebanyak 37,65 persen, 900 watt sebanyak 42,11 persen, 1.300 watt sebanyak 9,17 persen, 2.200 watt sebanyak 1,95 persen, dan yang menggunakan daya terpasang lebih dari 2.200 watt ada sebanyak 0,14 persen.



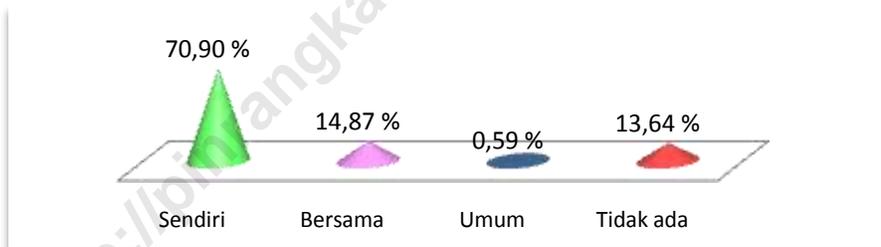
Gambar 34. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PLN Menurut Kab/Kota, Dan Daya Terpasang, 2013

7.2.3. Tempat Pembuangan Tinja

Sistem pembuangan tinja erat kaitannya dengan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan kebersihan rumah tangga. Sistem pembuangan tinja sangat mempengaruhi kualitas lingkungan di sekitar tempat tinggal rumah tangga tersebut. Kriteria akses terhadap sanitasi layak adalah penggunaan fasilitas

tempat Buang Air Besar (BAB) milik sendiri atau bersama, menggunakan kloset dan tempat pembuangan akhir tinjanya berupa tangki septik atau sarana pembuangan air limbah (SPAL).

Pengertian jamban adalah suatu bangunan yang digunakan untuk membuang dan mengumpulkan kotoran sehingga tidak menjadi penyebab suatu penyakit serta tidak mengotori permukaan (Kusnoputranto, 1997). Rumah tangga di Kabupaten Pinrang yang menggunakan jamban sendiri sebesar 70,90 persen dan jamban bersama 14,87 persen. Sebanyak 0,59 persen rumah tangga menggunakan jamban umum dan masih terdapat 13,64 persen rumah tangga yang tidak memiliki jamban. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa masih ada 14,23 persen rumah tangga tidak memiliki fasilitas sanitasi yang layak.

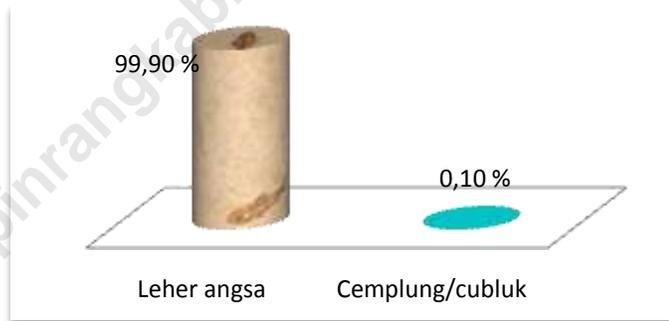


Gambar 35. Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, 2013

Dari beberapa jenis kloset, hanya ada dua jenis kloset yang digunakan penduduk Kabupaten Pinrang yaitu kloset leher angsa dan jamban cemplung/cubluk. Jamban Leher Angsa merupakan jamban leher lubang closet berbentuk lengkungan, dengan demikian akan terisi air gunanya sebagai sumbat sehingga dapat mencegah bau busuk serta masuknya binatang-binatang kecil. Jamban model ini adalah model yang terbaik yang dianjurkan dalam kesehatan

lingkungan. Jamban leher angsa digunakan oleh mayoritas rumah tangga (99,90 persen).

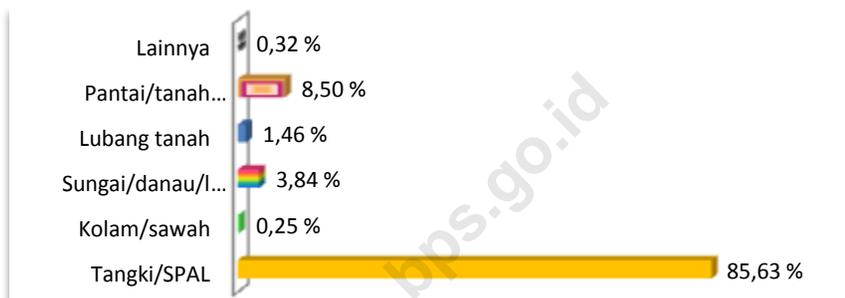
Jamban cubluk memiliki tempat penampungan tinja dibawah bangunan jamban yang fungsinya mengisolasi tinja sedemikian rupa sehingga tidak dimungkinkan penyebaran dari bakteri secara langsung. Jenis jamban ini, kotoran langsung masuk ke jamban dan tidak terlalu dalam karena akan menotori air tanah, kedalamannya sekitar 1,5-3 meter (Mashuri, 1994). Jamban leher angsa lebih baik daripada jamban cubluk. Berdasarkan data Susenas 2013, hanya 0,1 persen rumah tangga yang menggunakan jamban cempluk/cubluk atau dengan kata lain menggunakan jenis kloset yang tidak sehat.



Gambar 36. Persentase Rumah Tangga yang Mempunyai Fasilitas Tempat Buang Air Besar Menurut Kab/Kota, dan Jenis Kloset yang Digunakan, 2013

Perilaku BAB masyarakat yang belum semuanya menggunakan jamban, dihadapkan pada masih banyaknya jumlah jamban yang tidak memenuhi standar (jamban yang tidak sehat). Terlihat dari Gambar 35, tempat pembuangan akhir tinja yang digunakan sebagian besar rumah tangga (85,63 persen) telah menggunakan tangki/SPAL. Sementara itu, 14,37 persen rumah

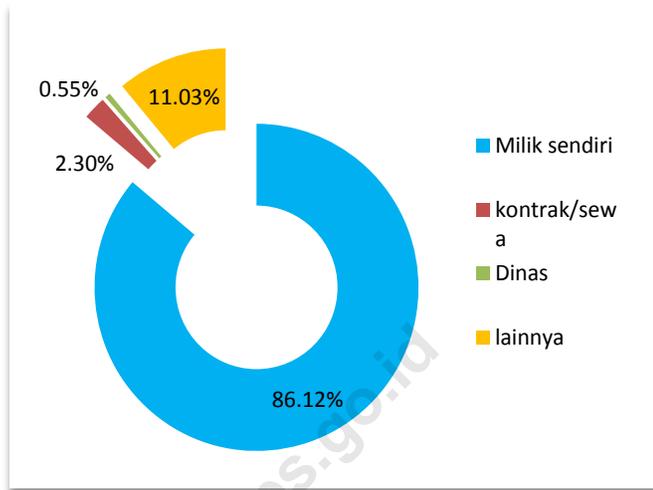
tangga masih belum memiliki pembuangan akhir tinja yang layak. Dampak serius membuang kotoran yang tidak sehat menyebabkan pencemaran tanah, air dan udara sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan dan pada akhirnya mempengaruhi kesehatan anggota rumah tangga.



Gambar 37. Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja, 2013

7.3. Status Kepemilikan Rumah

Salah satu indikator yang digunakan untuk melihat tingkat kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat adalah status kepemilikan rumah tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat mempengaruhi status kepemilikan tempat tinggal. Status kepemilikan rumah menurut data susenas dikelompokkan menjadi empat macam yaitu milik sendiri/milik orangtua, sewa/kontrak, dinas dan lainnya. Rumah tangga yang menempati rumah tinggal milik sendiri dikatakan telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.



Gambar 38. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal, 2013

Sebagian besar penduduk Kabupaten Pinrang telah memiliki rumah dengan status milik sendiri yaitu sebanyak 86,12 persen. Untuk status kepemilikan rumah tinggal lainnya, sebanyak 11,03 persen rumah tangga menempati rumah tinggal bebas sewa milik orang lain yaitu sebanyak 1,36 persen rumah tangga menempati rumah dengan status bebas sewa milik orang lain dan 9,67 persen rumah tangga menempati rumah dengan status bebas sewa milik orang tua/sanak/saudara. Persentase rumah tangga yang mengontrak/menyewa rumah tinggal terdapat sebanyak 2,30 persen.

<http://pinrangkab.bps.go.id>



Bab VIII

Konsumsi Rumah Tangga dan Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan masalah mendasar yang harus diselesaikan oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah. penanggulangan kemiskinan memerlukan langkah-langkah strategis dan sistemik yang komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak. Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar warga miskin, peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat miskin, penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat serta melaksanakan percepatan pembangunan daerah tertinggal.

Penanganan kemiskinan perlu didukung oleh data yang baik agar program-program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, menentukan target dalam perencanaan pembangunan untuk pengentasan kemiskinan, serta membandingkan kondisi kemiskinan antar waktu dan antar daerah.

Pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini banyak digunakan di negara-negara berkembang lainnya. Dengan pendekatan

ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Menurut pendekatan ini, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK). Secara teknis GK dibangun dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Nonmakanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari; sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Data mengenai persentase penduduk miskin diperoleh dari pendataan Susenas pada modul konsumsi. Dalam survey tersebut dicatat seluruh pengeluaran responden baik makanan maupun non makanan. Sejak tahun 2012 pengumpulan data Susenas dilaksanakan setiap triwulan untuk memperoleh data konsumsi rumah tangga yang lebih

8.1. Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga dibedakan atas dua kelompok besar yaitu makanan dan non makanan. Perubahan pendapatan rumah tangga akan mempengaruhi perubahan pola konsumsi. Semakin tinggi pendapatan rumah tangga maka proporsi pengeluaran untuk non makanan akan semakin besar. Pergeseran pola konsumsi ini dipengaruhi oleh elastisitas permintaan terhadap komoditi-komoditi makanan yang rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap komoditi-komoditi non makanan pada umumnya tinggi. Bila dicermati

pada kelompok penduduk dengan pendapatan yang tinggi, pengeluaran untuk makanan sudah mencapai titik jenuh sehingga peningkatan pendapatan digunakan untuk pengeluaran lainnya seperti barang kebutuhan tersier dan investasi. Dengan demikian pola pengeluaran dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk.

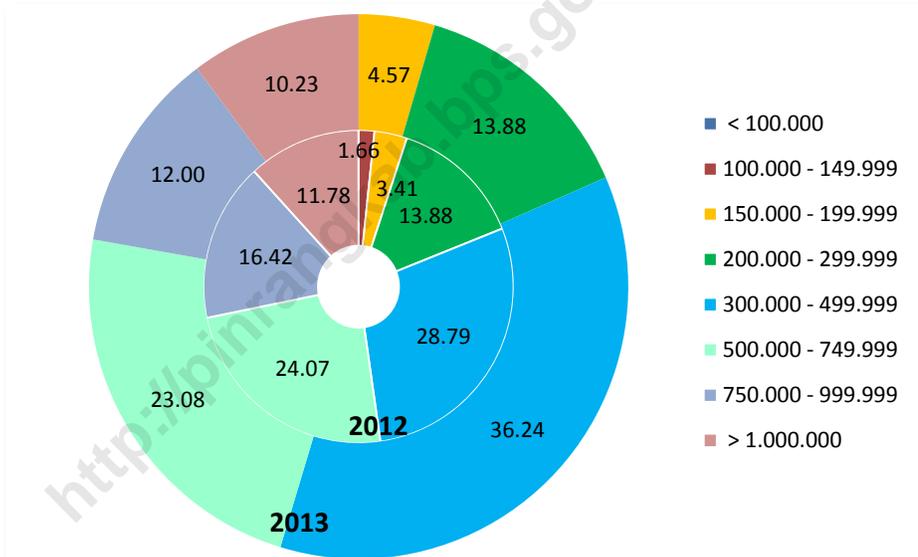


Gambar 39. Persentase Konsumsi makanan dan non makanan penduduk Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2013

Persentase rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2013 untuk makanan lebih besar (50,63 persen) dibandingkan non makanan (49,37 persen). Kondisi tersebut berlawanan dengan tahun 2012 dimana proporsi pengeluaran untuk makanan lebih kecil (48,57 persen) dibandingkan non makanan (51,43 persen). Hal ini dapat dipengaruhi oleh dua hal yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun atau perkembangan harga komoditi makanan mengalami kenaikan pada tahun 2013.

Gambar 40 menunjukkan persentase penduduk menurut kelompok pengeluaran per kapita per tahun pada tahun 2012 dan 2013. Pada tahun 2013 mayoritas penduduk Kabupaten Pinrang memiliki pengeluaran per kapita

300.000-499.999 rupiah per tahun, demikian pula pada tahun 2012. Persentase penduduk pada kelompok pengeluaran 300.000 – 499.999 rupiah mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu dari 28,79 persen pada tahun 2012 menjadi 36,24 persen pada tahun 2013. Pada kelompok pengeluaran yang lebih tinggi nampak bahwa persentase penduduk di setiap kelompok pengeluaran mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini memperkuat indikasi adanya penurunan kesejahteraan masyarakat.



Gambar 40. Persentase Penduduk Menurut Kelompok Pengeluaran di Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2013

Untuk pengeluaran makanan, persentase terbesar pada tahun 2013 terdapat pada kelompok pengeluaran 200.000-299.999 rupiah. Berbeda dari tahun sebelumnya dimana persentase terbesar berada pada kelompok pengeluaran 300.000-499.999 rupiah. Sementara itu, persentase terkecil untuk

tahun 2013 terdapat pada kelompok pengeluaran > 1.000.000 rupiah yaitu 0,09 persen.

Pola yang serupa tampak pada pengeluaran non makanan. pada tahun 2013 persentase terbesar pengeluaran non makanan penduduk Kabupaten Pinrang berada pada rentang 200.000-299.999 yaitu sebesar 19,97 persen. Sementara pada tahun 2012 persentase terbesar berada pada kelompok pengeluaran 300.000-499.99 yaitu sebesar 19,58 persen. Persentase terkecil pengeluaran non makanan penduduk Kabupaten Pinrang pada tahun 2013 adalah pada kelompok pengeluaran 750.000-999.999 rupiah yaitu 1,63 persen.

Rata-rata pengeluaran makanan dan non makanan penduduk Kabupaten Pinrang tahun 2013 adalah sekitar 300.000 rupiah. Secara umum persentase penduduk dengan pengeluaran di bawah rata-rata lebih tinggi dibandingkan yang di atas rata-rata. Penduduk yang memiliki pengeluaran makanan di bawah rata-rata ada sebanyak 62,25 persen dan yang memiliki pengeluaran di atas rata-rata adalah 37,75 persen. Sementara itu, untuk pengeluaran non makanan, persentase penduduk yang memiliki pengeluaran di atas rata-rata sebanyak 70,80 persen dan yang memiliki pengeluaran di bawah rata-rata sebanyak 29,20 persen.

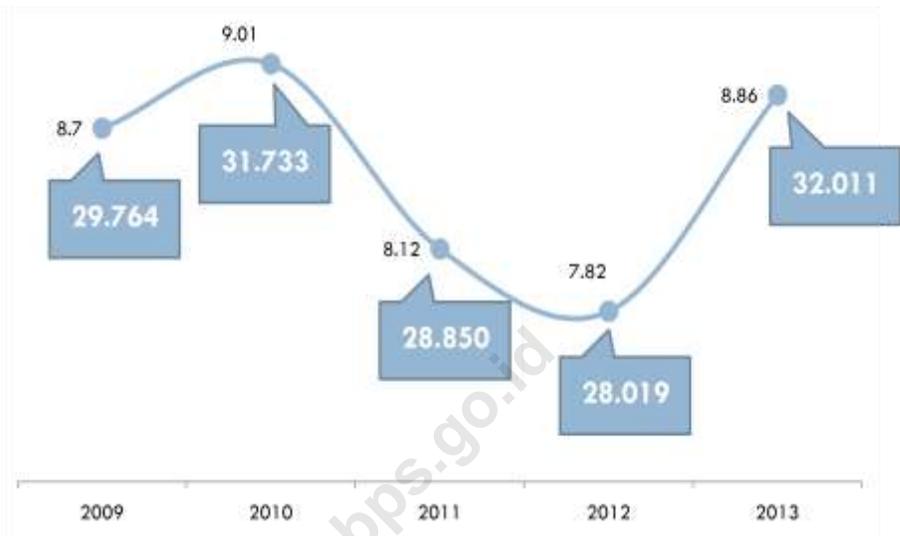
Tabel 7. Persentase Penduduk Kabupaten Pinrang Menurut Kelompok Pengeluaran Makanan dan Non Makanan Tahun 2012-2013

Kelompok Pengeluaran	2012		2013	
	Makanan	Non Makanan	Makanan	Non Makanan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
< 100.000	2,70	19,35	0.00	18.25
100.000 - 149.999	8,38	18,17	8.89	18.96
150.000 - 199.999	19,92	14,13	19.57	13.62
200.000 - 299.999	27,50	17,93	33.80	19.97
300.000 - 499.999	32,93	19,58	27.79	17.57
500.000 - 749.999	7,75	6,09	8.10	6.29
750.000 - 999.999	0,53	2,15	1.76	1.63
> 1.000.000	0,31	2,59	0.09	3.70

8.2 Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pinrang pada periode 2009-2013 cukup fluktuatif (Gambar 41). Persentase penduduk miskin Kabupaten Pinrang mengalami kenaikan pada tahun 2010 dan 2013. Persentase penduduk miskin Kabupaten Pinrang pada tahun 2010 sebesar 9,01 persen meningkat dibanding tahun 2009 yaitu 8,7 persen. Demikian pula pada tahun 2013, persentase penduduk miskin Kabupaten Pinrang sebesar 8,86 persen mengalami kenaikan setelah mengalami penurunan pada tahun-tahun sebelumnya yaitu dari 8,12 persen pada tahun 2011 menjadi 7,82 persen pada tahun 2012.



Gambar 41. Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pinrang Tahun 2009-2013

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Pinrang pada tahun 2013 sebesar 32.011 jiwa, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yaitu 28.019 pada tahun 2012. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan persentase penduduk miskin Kabupaten Pinrang pada tahun 2013 adalah kenaikan harga BBM pada bulan Juni 2013. Kenaikan harga BBM memiliki multiplier effect terhadap harga-harga komoditas lain sehingga mendorong kenaikan harga secara umum. Hal ini mengakibatkan kenaikan garis kemiskinan dari Rp 207.073,- pada tahun 2012 menjadi Rp 221.717,- pada tahun 2013. Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batasan untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sehingga dapat

dipahami jika kenaikan garis kemiskinan ini diikuti dengan peningkatan persentase penduduk miskin.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan.

Pada periode 2012-2013 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami penurunan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 1,37 pada tahun 2012 menjadi 1,16 pada tahun 2013. Demikian pula indeks keparahan kemiskinan, pada tahun 2013 sebesar 0,22 lebih rendah dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 0,40. Penurunan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Tabel 8. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2013

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)
(1)	(2)	(3)
2012	1.37	0.40
2013	1.16	0.22

<http://pinrangkab.bps.go.id>



DATA

Mencerdaskan Bangsa

<http://pinrangkab.bps.go.id>



**SADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN PINRANG**

Jl. Andi Ika No.18 Plerang, Sulawesi Selatan 91211

Telp (0421) 82821 Fax (0421) 3812263

E-mail: bps.7336@csnolhast.go.id